

Pengembangan Kurikulum Ekonomi Pancasila

Teori dan Implementasinya di Pendidikan Menengah

Rino, S.Pd, M.Pd

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Ekonomi adalah salah satu kajian dalam rumpun ilmu-ilmu sosial yang cukup mendapat perhatian luas dari masyarakat, karena membicarakan ekonomi tidak akan dapat dipisahkan dari kehidupan baik secara makro maupun secara mikro. Dalam tataran mikroekonomi yang lebih menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi dalam ruang lingkup produksi, distribusi dan konsumsi, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan serta upaya untuk memaksimalkan kepuasan dalam berbagai keterbatasan, sedangkan dalam makro ekonomi lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan pokok dalam perekonomian secara lebih luas dalam kehidupan bernegara yaitu masalah pertumbuhan, pengangguran, inflasi dan neraca pembayaran. Oleh karena itu sangatlah wajar dan penting sekali ekonomi diajarkan sebagai ilmu pada berbagai jenjang pendidikan di negara kita dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi yang diharapkan akan tertanam dalam diri peserta didik pemahaman dan kemampuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup dan melaksanakan aktifitas ekonomi itu sendiri sesuai dengan bidang kehidupan yang dijalanainya.

Membicarakan pengajaran ilmu ekonomi tidak dapat juga dilepaskan dari sistem ekonomi yang berkembang didunia hari ini serta arah dan orientasi kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara. Dua sitem ekonomi yang cukup mendominasi dalam perkembangan dunia hari ini adalah sistem ekonomi liberal yang diusung oleh Amerika Serikat dan Eropah serta sistem ekonomi sosialis yang diusung oleh RRC dan Rusia, disamping itu beberapa negara di kawasan timur tengah memakai sistem ekonomi islam, akan tetapi dalam implementasi dan praktiknya pada berbagai negara memperlihatkan bahwa tidak ada negara yang murni melaksanakan sistem ekonomi liberal secara penuh karena didalamnya ternyata juga ditemui adanya

peran negara dengan sejumlah kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai intervensi untuk kepentingan nasional negara bersangkutan, begitu juga dengan negara yang memakai sistem ekonomi sosialis seperti Cina dan Rusia dimana kebebasan individu dan berusaha masih terbuka, namun tidak berarti ciri masing-masingnya sebagai sistem ekonomi hilang sama sekali.

Indonesia sebagai negara dengan Pancasila sebagai dasar negara menamakan diri sebagai negara yang memakai sistem ekonomi Pancasila, intisari Pancasila menurut Bung Karno (Irawan:2008) adalah gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik *trisila* yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi, Profesor Mubyarto (2003) mengartikan sistem ekonomi pancasila adalah:

sistem ekonomi yang bermoralkan pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) dan mengacu pada setiap silanya, *sila pertama* Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, *sila kedua* Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional, *sila ketiga* Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi, *sila keempat* Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi, *sila kelima* Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Defenisi ini secara tegas mengatakan bahwa bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah pedoman dan tolak ukur perilaku untuk menjalankan aktifitas perekonomian baik secara makro maupun secara mikro sehingga tidak boleh bertentangan dan bersebrangan dengan tatanan nilai yang sudah tertera dalam Pancasila itu sendiri. Pemikiran tentang ekonomi Pancasila adalah sebuah produk dan karya besar dari para pendiri bangsa ini yang menggali dari nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang kemudian diwujudkan dengan kesepakatan bersama untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak ada tawar menawar lagi, maka sudah seharusnya juga ekonomi Pancasila ini terlihat nyata dalam praktik dan pengajaran ekonomi di negeri kita yang harus diajarkan dari

pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi sehingga akan melahirkan manusia-manusia pancasilais yang menjalankan aktifitas perekonomian Pancasila

Pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia baik di sekolah menengah terlebih perguruan tinggi sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, buku-buku teks ekonomi di sekolah lanjutan hanyalah derivasi ajaran ekonomi neoklasik di perguruan tinggi yang “disederhanakan” sesuai dengan taraf berpikir siswa. Salah satu “kelemahan” mendasar ajaran ekonomi Neoklasik adalah terlalu “bias” kepada pengusaha (besar). Materi ekonomi yang diajarkan dalam ekonomi Neoklasik adalah materi-materi yang berpijak pada keyakinan manusia sebagai *homo economicus*, yang selalu mengejar *self interest* secara efisien. Efisiensi ekonomi dianggap hanya terwujud melalui maksimisasi profit dan minimisasi biaya. Demikian pula halnya, efisiensi dipercaya hanya dapat dicapai melalui persaingan pasar (pasar bebas), sehingga ajaran yang ditonjolkan adalah persaingan (kompetitivisme), dan bukannya kerja sama atau kooperasi. Hal ini juga menampakkan kekeliruan ajaran ekonomi Neoklasik yang terlalu mengagungkan “pasar”, dengan melupakan aspek kelembagaan sosial-budaya, politik, dan ideologi “gotong royong” yang dianut Indonesia.

Kita akan kesulitan mencari buku teks ekonomi yang memuat bahasan mengenai keadilan ekonomi (sosial), termasuk diantaranya bahasan kemiskinan dan ketimpangan yang dialami sedikitnya 35 juta pelaku ekonomi rakyat di Indonesia. Hal ini karena adanya anggapan bahwa keadilan bukanlah masalah dalam ilmu ekonomi, melainkan sudah masuk wilayah hukum ataupun politik. Jadi mudah dipahami apabila bahasan mengenai ekonomi rakyat “dihindari” dalam buku ajar ekonomi. Padahal lebih dari 90% pelaku usaha kita adalah ekonomi rakyat, yang berkecimpung dalam usaha berskala mikro, kecil, dan menengah

Selama ini materi-materi ajar ekonomi di sekolah lanjutan banyak “dipasok” oleh perguruan tinggi (fakultas ekonomi), sehingga ajaran ekonomi yang dipelajari relatif sama. Namun, ada perbedaan yang cukup esensial dalam aspek metodologi pengajaran di sekolah lanjutan dan Pendidikan Tinggi. Jika pengajaran ekonomi di

perguruan tinggi banyak dikritik karena menekankan pada metode (analisis) deduktif saja tanpa banyak melakukan penelitian ke lapangan (induktif), maka di sekolah lanjutan sudah mulai dikembangkan penelitian lapangan sebagai alternatif metode pengajaran. Di samping itu, guru-guru sekolah lanjutan nampaknya “fleksibel” dalam mengajarkan ilmu ekonomi yang lebih riil (*real-life economy*) kepada siswanya

Pun dalam kehidupan yang lebih luas praktek pengaturan perekonomian negara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital liberal, lahirnya kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuan dan ahli ekonomi yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang banyak menamatkan studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama Amerika, menurut Mubyarto pada masa era orde banyak teknokrat-teknokrat dari Universitas Indonesia yang diangkat menjadi menteri terutama pada beberapa pos strategis dibidang perekonomian sehingga melahirkan julukan baru bagi Fakultas Ekonomi UI ini sebagai Fakultas yang mengajarkan paham liberal. Nasution (2008) juga menyatakan bahwa saat ini ilmu ekonomi yang diajarkan di Kampus maupun sekolah merupakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dari praktik ekonomi barat, tepatnya ilmu ekonomi neoklasik, baik monetarist maupun keynesian dan pengajaran ekonomi ini menjadi doktrin sehingga dalam praktiknya ekonomi pasar yang dilandasi oleh paham neoklasik menjadi lebih dominan dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, baik dalam tataran pelaku usaha, konsumen maupun pengambil kebijakan.

Pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik khususnya di Indonesia tidaklah dapat disalahkan karena disatu sisi sebagai negara berkembang yang ingin melakukan akselerasi dalam pembangunan harus melakukan berbagai terobosan dan mengadopsi berbagai kemajuan dari perkembangan dunia yang ada. Akan tetapi semangat untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan dengan mengadopsinya secara mentah-mentah tanpa adanya proses seleksi dan kesepakatan secara nasional yang mempertimbangkan berbagai aspek adalah sesuatu tindakan yang sangat keliru. Sistem ekonomi liberal kapitalis yang lahir dan berkembang di negara asalnya merupakan

wujud yang sesuai dengan karaktersistik bangsa Amerika sekaligus merupakan jelmaan dari negara Amerika yang menganut ideologi liberalisme, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh Amerika juga merupakan wujud nyata dari ideologi liberalisme yang sangat sesuai dengan bangsa Amerika. Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan sebuah warisan budaya yang telah dijadikan sebagai jati diri bangsa juga memiliki prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi pokok dalam mengatur perekonomian negara. Maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan tolak ukur kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan yang penting adalah menanamkan Pancasila kedalam lubuk hati setiap rakyat Indonesia. Pengajaran ekonomi yang ada sekarang ternyata sangat menjauh dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan terjadi pergeseran yang lebih memilih pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik sebagai yang utama dalam pengajarannya. Sri Edi Swasono memaparkan sembilan kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia khususnya di perguruan tinggi yaitu (1) Pengajaran ilmu ekonomi saat ini belum mampu melepaskan diri dari pemikiran neoklasikal (2) Pengajaran ilmu ekonomi menyandarakan diri pada paham kompetitivisme dengan kuatnya (3) Pengajaran ekonomi di kampus-kampus sejak semula telah kita awali dengan paham *market fundamentalism* (4) Telah diakui adanya apa yang disebut *micro-macro ill*s (atau *micro-macro rifts*) (5) Pengajaran ilmu ekonomi kurang memberikan perhatian cukup tentang sistem ekonomi komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme (6) Pengajaran ilmu ekonomi sejak awal telah diberikan kepada mahasiswa tanpa membedakan antara *prinsip-prinsip ekonomi* dan *hukum-hukum ekonomi* (7) Pelajaran ilmu ekonomi di sekolah-sekolah menengah kita, yang tidak saja sepenuhnya menjiplak kekeliruan yang terjadi di kampus-kampus (8) Pengajaran ilmu ekonomi banyak mengabaikan metode induktif dan lebih menekankan pada metode deduktif (9) di ruang-ruang kelas globalisasi ekonomi banyak diungkapkan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia

Kekeliruan besar ini sudah saatnya kita sadari khususnya para pengajar ekonomi pada berbagai jenjang pendidikan di Indonesia karena kesalahan fatal yang dilakukan ini akan berdampak luas terhadap masa depan bangsa kita pada masa depan karena generasi hari ini adalah aset penting yang akan melanjutkan tonggak estafet perjuangan bangsa, maka dipandang perlu untuk menyusun dan merekonstruksikan kurikulum ekonomi Pancasila yang akan diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan di negara kita mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dalam hal ini penulis mencoba menawarkan pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi Pancasila pada level pendidikan menengah

II. Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka masalah pokok yang diangkat dalam makalah ini adalah “ *Pengembangan Kurikulum Ekonomi Pancasila Teori dan Implementasinya pada Pendidikan Menengah* ” secara rinci masalah yang akan diuraikan dalam makalah ini adalah

1. Sejauhmanakah urgensinya ekonomi pancasila dijadikan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum di pendidikan menengah ?
2. Bagaimanakah pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila pada jenjang pendidikan menengah?

III. Prosedur Pemecahan Masalah dan Sistematika Uraian

Masalah yang telah dikemukakan di atas akan diselesaikan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan teori dan praktis, secara teori akan menggunakan kajian-kajian pustaka yang relevan, hasil-hasil penelitian, makalah dan seminar, sedangkan secara praktis dengan menggunakan data-data yang tersedia di lapangan

Berangkat dari permasalahan yang ada maka sistematika uraian dalam makalah ini adalah:

A. Konsep kurikulum

1. Pengertian kurikulum
2. Landasan pengembangan kurikulum

3. Unsur-unsur kurikulum
 4. Fungsi dan peranan kurikulum
 5. Model pengembangan kurikulum
 6. Inovasi dan perubahan kurikulum
- B. Konsep ekonomi Pancasila
1. Pengertian ekonomi Pancasila
 2. Tinjauan ekonomi Pancasila
 - a. Akademis
 - b. Historis
 - c. Ideologis dan Politis
 3. Karakteristik ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi
 4. Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan
- C. Pengembangan Kurikulum Ekonomi Pancasila dalam Pendidikan Menengah
1. Pengajaran ekonomi di Indonesia
 2. Pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila di SMA dan MA

BAB II PEMBAHASAN

I. Konsepsi Kurikulum

A. Pengertian Kurikulum

Dalam kamus *Webster* (1856) yang dikutip oleh Nasution (2006:1) istilah kurikulum berarti “ 1. a race course; a place for running; a chariot, 2. a course of study in a university”. Kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari atau kereta dalam perlombaan dari awal sampai akhir, kurikulum juga berarti *chariot* semacam kereta pacu pada zaman dulu yang membawa seseorang dari start sampai finish. Kamus *webster* juga memberikan penjelasan bahwa kurikulum yang digunakan dalam pendidikan didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran di sekolah atau mata kuliah di perguruan tinggi yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat, kurikulum juga berarti keseluruhan pelajaran yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan. Taylor (1949) mengemukakan empat konsep penting kurikulum dengan melontarkan empat pertanyaan sentral yang meminta jawaban secara rasional bagi perencanaan kurikulum ialah

(1) apa tujuan yang harus dicapai oleh sekolah? (*What educational purposes the school seek attain?*) (2) apa pengalaman-pengalaman belajar yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? (*How can learning experiences be selected which are likely to be useful in attaining these objectives?*) (3) bagaimana mengorganisasikan pengalaman-pengalaman tersebut? (*How can learning experiences be organized for effective instruction?*) (4) bagaimana kita dapat memutuskan apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai! (*How can the effectiveness of learning experiences be evaluated!*)

Empat pertanyaan pokok yang dikemukakan oleh Taylor mengidentifikasi empat poin penting dalam konsep kurikulum yaitu tujuan, pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi. Taba (1962) berpendapat bahwa kurikulum “cara mempersiapkan anak agar berpartisipasi sebagai anggota produktif dalam

masyarakat”, Lovat (1988) (siraj, 2008;1) menyatakan “kurikulum adalah kursus yang dijalankan (*course of action*)”, Hass (1987) (siraj, 2008;1)

mengatakan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang diperoleh oleh setiap individu pelajar dalam dalam suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas serta tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan yang telah dirancang dalam bentuk suatu teori rangka kerja serta kajian ataupun amalan professional pada masa lalu dan masa kini

Secara rinci Hass berpendapat kurikulum adalah (1) suatu prarancangan (2) rancangan yang mengandung tujuan, teori, dan tekanan-tekanan mengenai tekanan sosial, perkembangan manusia, pembelajaran dan ilmu pengetahuan serta kognitif yang semuanya menjadi panduan kepada prarancangan disemua tingkat (3) rancangan pengajaran oleh guru (4) pengalaman belajar bagi siswa (5) merupakan program pendidikan. Dalam pandangan Zais (1976:1) “*curriculum ordinarily is used by specialist in the field in two ways: (1) to indicate, roughly, a plan for the education of learners, and (2) to identify a field of study. Curriculum as a plan for the education of learners is part of the subject matter of the curriculum filed*”. Sejalan dengan Zais, Murray Print (1993:23) “*curriculum is defined as all the planned learning opportunities offered to learner by the educational institution and the experiences learners encounther when that curriculum is implemented*”. Saylor dan Alexander dalam karyanya berjudul *Curriculum Palnning for Better Teaching and Learning (1956)*” *The curriculum is the sum total of school’s effort to influence learning, whether in the classroom, on the playground, or out of school*”. Dalam pandangan Kelly (2004) “kurikulum Perencanaan pembelajaran yang praktis, efektif dan produktif, menawarkan banyak konten pengetahuan atau mata pelajaran yang sekolah ajarkan, trasmisikan, atau, berikan”. Nasution (2006:9) mengidentifikasikan kurikulum dalam empat segi yakni kurikulum dapat dilihat sebagai produk, kurikulum dapat dipandang sebagai program, kurikulum dipandang sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa dan kurikulum sebagai pengalaman siswa. Sementara Sukmadinata (2004,27) menekankan kurikulum pada tiga konsep penting

yaitu (1) kurikulum sebagai substansi (2) kurikulum sebagai sistem (3) kurikulum sebagai bidang studi.

Defenisi yang dikemukakan oleh ahli-ahli di atas secara substantif tidaklah bertentangan dan memiliki kesamaan yang memandang (1) kurikulum sebagai perencanaan belajar yang berisikan tujuan pendidikan (2) kurikulum sebagai pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa (3) kurikulum sebagai dokumen tertulis yang berisikan kumpulan bahan ajar dan sejumlah mata pelajaran untuk diberikan kepada siswa. Sehingga pengembangan kurikulum tidak akan pernah beranjak dari substansi dasar kurikulum itu sendiri dalam tataran rencana, pengalaman belajar yang terdokumentasi dengan baik. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 juga disebutkan bahwa “ kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”

B. Landasan Pengembangan Kurikulum

Setiap tahapan dalam pengembangan kurikulum baik perencanaan / perancangan / penyusunan kurikulum, implementasi serta evaluasinya haruslah memperhatikan landasan-landasan pokok serta prinsip dasar pengembangan kurikulum. Landasan ini diperhatikan sebagai pijakan awal bagi pengembang dan perancang kurikulum dan akan sangat menentukan corak dan bentuk kurikulum yang akan dilahirkan nantinya. Diibaratkan dengan pekerjaan seorang arsitektur bangunan yang akan mendirikan sebuah bangunan berlantai empat pada sebidang tanah maka langkah pertama dan sangat penting untuk dipikirkan adalah menciptakan landasan /pondasi bangunan yang kokoh dan dalam sehingga mampu menopang bangunan yang akan dibuat yang berlantai empat itu. Menurut Murray Print (1993;32) landasan kurikulum (*curriculum foundation*) adalah hal yang sangat mendasar dan berpengaruh pada bentuk dan pikiran pengembang kurikulum yang akan mempengaruhi penyusunan pada isi dan struktur kurikulum. Senada dengan pendapat Murray Print menurut Nasution (2006;10) mengembangkan kurikulum bukanlah sesuatu yang tidak

mudah dan banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dengan cara menghadirkan pertanyaan pokok dan memunculkannya dalam benak pengembang dan perancang kurikulum untuk kemudian dipertimbangan dan dipikirkan secara mendalam sehingga akan menghasilkan sebuah rancangan kurikulum yang memiliki kekuatan dan analisis pikiran yang tajam dan kuat.

Dalam pandangan Tyler (1949) untuk menyusun tujuan pendidikan yang merupakan langkah pertama yang ditawarkannya dalam pengembangan kurikulum dengan memperhatikan dua unsur pokok dalam pemilihan dan menentukan tujuan pendidikan yaitu unsur filosofi dan psikologi. Penggunaan filosofi dalam pemilihan tujuan mampu mengaktualkan secara operasional tujuan pendidikan itu sehingga dapat memilih dan mengeliminasi tujuan pendidikan yang ada, penggunaan psikologi dalam pembelajaran dan pemilihan tujuan dimaksudkan untuk memenuhi karakteristik manusia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Taba (1962) menambahkan landasan-landasan yang ditolelir dan harus ada dalam melakukan pengembangan kurikulum adalah *pertama* landasan sosial bahwa analisis sosial dilakukan sebagai sesuatu yang sangat penting karena adanya perubahan teknologi sosial dimana pendidikan memiliki aturan dan bermain serta memiliki hubungan dengan aspek struktural sosial, demografi, ekonomi, politik dan sosial serta ideologi dan spiritualnya *kedua* landasan budaya dimana faktor budaya sudah sangat jelas membutuhkan pendekatan antara disiplin ilmu pendidikan dengan disiplin ilmu budaya itu sendiri dan akan membawa perubahan manusia dan lingkungan sosial *ketiga* landasan mental dan intelektual dimana pengukuran kemampuan mental dan intelektual anak dalam sekolah akan digunakan untuk menentukan kelanjutan pendidikan itu serta menentukan juga tujuan sekolah *keempat* landasan pengetahuan bahwa pengetahuan adalah hal yang sangat berharga sekali dalam pendidikan dan prosesnya, kurikulum seharusnya disusun dengan memperhatikan subjek, isi pelajaran dan disiplin dengan analisis dan digali dari disiplin ilmu yang ada. Zais (1976) mengemukakan tiga landasan dalam pengembangan kurikulum yaitu *pertama* landasan filosofi yaitu kurikulum diserap secara cermat dengan filosofi kebudayaan

dari kehidupan bahwa seorang filosofi pendidikan di promosikan untuk menulis "Apa yang benar-benar dipercaya manusia....lebih sering dinyatakan dalam guru mengajar siswanya dari pada dalam pernyataan umumnya *kedua* landasan sosial budaya, sosial /kemasyarakatan dan budaya adalah dua hal yang berbeda, namun mereka mempunyai keterkaitan yang erat, sehingga dapat dikatakan tanpa kebudayaan tidak akan ada kemasyarakatan dan tanpa kemasyarakatan tidak akan muncul budaya, karakter budaya adalah satu elemen yang besar pengaruhnya terhadap hakekat dan penyusunan sebuah kurikulum, baik itu tujuan, isi, kegiatan belajar mengajar dan evaluasinya *ketiga* landasan individu, jika kurikulum diharapkan relevan harus mempertimbangkan perhatian untuk masa depan manusia sebagai individu dan untuk masa depan kurikulum. Murray Print (1988) berpandangan bahwa landasan kurikulum terdiri atas tiga landasan pokok yang harus dijadikan pedoman oleh pengembang kurikulum dalam mengembangkan kurikulum yaitu *pertama* landasan filosofis yaitu menjelaskan tentang konsep dan dalil yang dapat dipergunakan bersumber dari pengetahuan dan aktifitas yang bisa dimengerti, landasan filosofis bersumber dari *ontology* (apa yang ada) *epistemology* (apa yang benar) *axiology* (apa yang baik) *kedua* landasan sosiologis adalah kondisi sosial dan budaya yang berpengaruh pada bentuk kurikulum disekolah *ketiga* landasan psikologis adalah landasan yang memperhatikan, menguraikan, menjelaskan, memprediksi dan mengamati perilaku manusia. R. Naution (2006) menyebut istilah landasan dengan azaz yang pada prinsipnya keduanya tidak memiliki perbedaan yang signifikan, ada empat azaz penting dalam pengembangan kurikulum yaitu *pertama* azaz filosofis yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara *kedua* azaz psikologis yaitu memperhitungkan faktor anak dalam kurikulum yaitu psikologi anak, perkembangan anak, psikologi belajar dan bagaimana proses belajar anak *ketiga* azaz sosiologis yaitu kebudayaan masyarakat, kebudayaan manusia, hasil kerja manusia *keempat* azaz organisatoris yaitu mempertimbangkan bentuk dan organisasi bahan pelajaran yang disajikan. Pendapat Sukmadinata (2002) pun tidak berbeda dengan pendapat ahli yang ada yang merumuskan empat landasan dalam

pengembangan kurikulum yaitu *pertama* landasan fisiologis yaitu filsafat akan memberikan arah dan metodologi terhadap praktek pendidikan *kedua* landasan psikologis yaitu memperhatikan kondisi psikologis setiap individu dalam perkembangan dan perubahan baik secara fisik maupun intelektualnya serta perilakunya *ketiga* landasan sosial budaya dan ilmu pengetahuan teknologi yaitu perkembangan masyarakat dengan perubahan yang terjadi serta kemajuan dan temuan yang ada dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. AV Kelly (2004) menambahkan sebuah kajian penting yang harus juga diperhatikan oleh pengembangan kurikulum dalam melakukan tugasnya yaitu memperhatikan politik dan ideologi negara sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan kurikulum, dalam pandangan Kelly

pendidikan adalah hal penting dalam kegiatan politik, bahwa sistem pendidikan berencana untuk mempersiapkan generasi muda untuk memasuki kehidupan dewasa dalam masyarakat, suatu formalisasi/ pembentukan peran yang dimainkan dalam masyarakat primitive dengan semua populasi orang dewasa, konteks politik ini adalah suatu elemen utama dalam skema/ sistem pendidikan yang masing-masing skema/ sistem tersebut tidak dapat dimengerti dengan tepat.

Terlihat adanya penekanan Kelly bahwa pendidikan adalah aset penting bagi negara dalam mempersiapkan generasi muda sehingga kebijakan negara dalam mengurus pendidikan sering dijadikan sebagai salah satu komoditas dalam meraih dukungan dalam partisipasi politiknya dan kepentingan politik itu sendiri.

Semakin jelas bagi kita sebagai seorang pengembang kurikulum yang akan melaksanakan tugas besar ini bahwa pengembangan kurikulum tidak hanya sekedar melakukan penyesuaian-penyusunan materi, memperbaiki bahan ajar serta menyiapkan media dan melakukan evaluasi saja, namun pekerjaan pengembang kurikulum tidak hanya terbatas pada pekerjaan teknis namun juga merupakan pekerjaan konsep sehingga pengembang kurikulum dapat disamakan dengan seorang perencana bangunan yang harus memiliki kemampuan teknis dan pemahaman filosofis akan pekerjaannya. Pemahaman filosofis sebagai pengembang kurikulum dimulai dari

pemahaman yang dalam dengan berbagai landasan-landasan dan pola pikir dalam pengembangan kurikulum itu secara komprehensif disamping kemampuan non teknis lainnya yang harus dikuasai. Kalau kita gabungkan pendapat dari ahli yang ada maka pengembangan kurikulum harus memahami lima landasan utama dalam melakukan pengembangan kurikulum yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan masyarakat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta landasan ideologi dan politik seperti dalam gambar berikut.



Gambar 1. Landasan pengembangan kurikulum

1. Landasan Filosofis

Kajian-kajian filosofis kurikulum melingkupi kajian substansi keilmuan dan batang tubuh keilmuan yang akan diturunkan menjadi isi pelajaran untuk disampaikan kepada siswa, keberadaan filsafat dalam kurikulum adalah sangat fundamental sekali karena yaitu *pertama* filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan *kedua* filsafat dapat menentukan isi materi pelajaran yang harus diberikan

kepada siswa *ketiga* filsafat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan pelajaran *keempat* filsafat menentukan tolak ukur keberhasilan pendidikan. Maka pemahaman yang komprehensif tentang filsafat adalah hal yang utama yang harus dimiliki seorang pengembang kurikulum dan tentunya harus dipadu dengan kajian yang lain untuk memperkaya pemikiran pengembang kurikulum. Pemahaman yang benar dan ajeg tentang filsafat ini adalah sebuah *strating point* positif dan sangat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam proses pengembangan kurikulum itu.

2. Landasan Psikologis

Psikologis sering dipahami sebagai aspek kejiwaan seorang anak atau peserta didik. Kiranya pemahaman ini perlu diperkaya dengan konsep perilaku dan perkembangan intelektual, emosional dan spritual anak sehingga sebagai pengembang kurikulum dapat menyusun dan mengembangkan metode dengan muatan bahan yang mengikuti perkembangan itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa mengajar tidak cukup dengan keahlian penguasaan materi yang dimiliki akan tetapi keahlian psikologis dalam bentuk kemampuan memahami setiap perilaku anak serta perkembangannya juga harus dipahami. Setiap fase perkembangan anak memperlihatkan keberagaman dalam perilakunya yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik keluarga, lingkungan, masyarakat sehingga berpengaruh dalam pembentukan watak dan perilaku anak. Kondisi ini menuntut guru untuk mampu membaca situasi dan memperlakukan anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

3. Landasan Kemasyarakatan

Tidak ada yang tetap dalam hidup ini dan semuanya akan selalu berubah, begitu juga dengan kemasyarakatan yang termasuk didalamnya sosial, budaya. Semuanya akan selalu mengalami perubahan yang akan menimbulkan dua sisi yang berlawanan yaitu positif dan negatif. Perubahan aspek kemasyarakatan ini sangat nyata terlihat dalam struktur kemasyarakatan, kebiasaan, pola hidup, pekerjaan, pergaulan, tata perilaku, norma, keyakinan, dan lain sebagainya. Perubahan yang terjadi dalam aspek kemasyarakatan ini memperlihatkan arti dari hidup yang kita jalani. Perubahan yang terjadi setiap saat dan tidak terhitung jumlahnya, dalam kurikulum perubahan-

perubahan dalam aspek ini hendaknya diperhatikan secara seksama sehingga apa yang seharusnya dan apa yang ada dapat berjalan bersama dan tercipta sinergis dalam konten yang diajarkan dalam lingkungan pendidikan. Dalam pada itu penciptaan perubahan tidak mesti ada diluar sekolah dalam arti sekolah pun berperan dalam menghadirkan perubahan itu yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Tidak semua yang ada dalam masyarakat menjadi keharusan sekolah untuk menyediakannya, maka proses seleksi dan penyaringan mutlak dilakukan.

4. Landasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dicegah karena manusia dengan potensi akalnyanya terus berfikir dan menghasilkan temuan-temuan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi dan kebutuhan pada waktu itu. Pada satu sisi kita sangat bergembira dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang kajian ilmu sehingga akan semakin menambah arti hidup yang dijalani sementara disisi lain perkembangannya ilmu yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai positif dan moral akan berakibat terjadinya penyalahgunaan sehingga akan merusak dan menghancurkan tatanan hidup yang telah ada. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan maka teknologi sebagai salah bentuk karya dari kemajuan manusia dalam berpikir. Teknologi sering diidentikkan dengan temuan-temuan manusia dalam bentuk alat, padahal teknologi lebih luas dari hanya sekedar temuan dalam bentuk alat akan tetapi meliputi segala sesuatu cara yang dilakukan dan diupayakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sehingga sering disingkat dengan istilah IPTEK. Kemajuan penting dalam abad ini yang patut kita cermati adalah kemajuan IPTEK dalam bidang komunikasi dengan hadirnya sejumlah teknologi canggih berkomunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara seseorang dengan orang lain dalam berbagai dimensi pada waktu, tempat yang berbeda. Disamping itu perkembangan dalam bidang transportasi yang menghasilkan berbagai jenis kendaraan dengan bentuk, kecepatan dan fungsi yang akan memberikan kemudahan manusia dalam melakukan pekerjaan. Kemajuan IPTEK ini hendaknya direspon secara positif dan antusias oleh pengembang kurikulum untuk dapat dimanfaatkan demi

kepentingan pendidikan. Disatu sisi sekolah juga ditantang dengan sejumlah kurikulumnya untuk dapat berpartisipasi dalam kemajuan IPTEK.

5. Landasan Ideologi Politik

Ideologi sebuah negara sangat diilhami oleh kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan serta historis negara. Sehingga menjadi ciri khas yang harus dimiliki. Percaturan politik dunia hari ini ditenggarai dengan ideologi-ideologi yang dimiliki setiap negara di dunia dan terpolarisasi kepada ideologi barat dan timur. Secara historis ideologi barat sangat didominasi oleh paham kebebasan, individualistik yang dimotori oleh Amerika Serikat dan negara yang berada dikawasan eropa khususnya eropa barat. Sementara ideologi timur memiliki kecendrungan pada sosialis komunis yang dimotori oleh Rusia dan Cina. Namun disamping dua ideologi besar ini pada kawasan negara-negara di timur tengah mengusung nilai-nilai islam sebagai ideologi negaranya, dan beberapa negara di kawasan Asia mengusung ideologi agama dan budaya sebagai karaktersitiknya. Perbedaan ideologi negara didunia hari ini sangat kental terjadinya diseminasi dan perebutan pengaruh untuk kepentingan negara yang bersangkutan. Bahkan dalam skala yang lebih luas pertempuran dan peperangan yang acap terjadi sering dipicu oleh perbedaan ideologi dan kepentingan negaranya. Banyak kurikulum yang disusun oleh negara dipengaruhi oleh ideologi yang dimiliki untuk melanjutkan dan mewariskan kepada generasi penerus dinegaranya. Indonesia sebagai negara dengan ideologi Pancasila sudah sewajarnya melakukan proses internalisasi dan membumikan nilai pancasila dalam jiwa setiap manusia Indonesia sehingga dapat diteruskan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Proses internalisasi ini akan terlihat dalam penyusunan konten dalam pelajaran dan dikemas dalam pembelajaran yang profesional. Kepentingan negara dengan pendidikan dan generasi penerus sangat besar karena keberlanjutan negara ada ditangan mereka maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam pendidikan adalah representasi kepentingan negara dalam sektor pendidikan.

C. Komponen Kurikulum

Komponen kurikulum atau anatomi kurikulum adalah unsur-unsur penting yang harus dimiliki oleh kurikulum yang merupakan kesatuan sistem dan tidak terpisah satu dengan yang lainnya dan saling melengkapi.

1. Tujuan

Arah dan hasil yang ingin dicapai akan dirumuskan dalam tujuan yang telah disepakati. Tujuan akan membimbing dan mengarahkan setiap langkah dan tindakan agar selalu berada dalam trek yang benar dan tidak menyimpang, maka disamping sebagai penentu arah tujuan juga berperan sebagai pengawasan dan pengontrolan aktifitas dalam pendidikan. Zais (1976) membagi tujuan kurikulum kepada tiga macam yaitu *aims*, *goals*, dan *objectives*. Senada dengan itu Murray Print (1988) juga mengelompokkan tujuan atas *aims*, *goals*, dan *objectives*. Pada ketiga jenis istilah ini tidak memperlihatkan perbedaan yang substansi karena tetap merupakan konsep tujuan akan tetapi hanya perbedaannya pada levelisasi dan kepentingannya.

a. Aims

Aims adalah pernyataan tujuan kurikulum pada level tingkat nasional, sehingga dinyatakan sebagai tujuan kurikulum dari tujuan pendidikan nasional (Zais, 1976:307), lebih lanjut dijelaskan bahwa kurikulum dari tujuan pendidikan nasional merupakan sebuah pernyataan yang mendeskripsikan sebuah harapan hidup yang meliputi beberapa bagan nilai yang diambil secara sengaja maupun tidak dari bagian ilmu filsafat. Murray Print (1989:122) menyatakan *Aims* adalah pernyataan tujuan secara umum (luas) yang menunjukkan harapan yang ingin dicapai dalam terminologi sikap/perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Terdapat perbedaan antara Zais dan Print dalam menerjemahkan konsep Aims sebagai tujuan kurikulum akan tetapi benang merah yang dapat kita tarik adalah *aims* mencirikan tujuan kurikulum secara umum.

b. Goals

Zais menyatakan bahwa *goals* adalah kurikulum dari tujuan institusional lebih mengarah pada hasil yang ingin dicapai oleh sekolah, yang menunjukkan sebuah gambaran yang spesifik dari sebuah sekolah, dan merupakan bagian dari sistem sekolah. serta menunjukkan sasaran jangka lebih panjang dari pertimbangan penilaian kelas. Murray print berpendapat bahwa *goals* adalah tujuan yang lebih khusus yaitu tujuan yang dirancang dengan kata yang ringkas yang diturunkan dari tujuan secara umum.

c. Objectives

Menurut Zais *objectives* adalah tujuan yang berada pada tataran instruksional yang terlihat dalam setiap materi dan pokok bahasannya sedangkan Murray Print menyatakan bahwa *objectives* adalah kalimat yang lebih spesifik dari tujuan kurikulum yang diturunkan dari tujuan khusus yang dinyatakan secara tepat dan termasuk perilaku khusus siswa yang diharapkan.

Sukmadinata (2002;103) mengungkapkan bahwa dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah 1975/1976 mengenal tiga jenis tingkatan tujuan yang senada dengan pendapat Zais yaitu tujuan *pertama* tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang yang menjadi tujuan ideal pendidikan bangsa Indonesia *kedua* tujuan institusional yaitu sasaran pendidikan suatu lembaga pendidikan *ketiga* tujuan instruksional yaitu target yang harus dicapai oleh suatu mata pelajaran yang terdiri atas tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.

Walaupun terdapat perbedaan dalam melihat area tiga konsep tujuan itu namun dapat kita simpulkan bahwa tujuan kurikulum terdiri atas tingkatan tertentu yang mencerminkan levelisasi yang disesuaikan kebutuhan yang ingin dicapai sehingga seluruh energi dan aktifitas dalam kerangka pendidikan dan pengembangan kurikulum terbingkai dalam tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Isi (*content*)

Isi kurikulum adalah muatan-muatan yang dikandung dalam kurikulum yang tidak hanya berisikan satu atau dua muatan akan tetapi memiliki multikonten didalamnya. Brady (1992;102) menegaskan bahwa isi kurikulum dapat didefinisikan pada dua poin penting *pertama* isi kurikulum dapat dimaknai sebagai mata pelajaran dalam proses belajar mengajar yang termasuk didalamnya beberapa informasi faktual, pengetahuan, keahlian, konsep, sikap dan nilai *kedua* isi kurikulum adalah sesuatu yang penting dalam proses belajar mengajar dimana dua elemen pokok kurikulum yang termuat didalamnya adalah isi dan metode dalam interaksi yang tetap. Zais (1976;324) menyatakan bahwa isi kurikulum biasanya terdiri atas tiga elemen yaitu pengetahuan, proses dan nilai.

Anggapan yang berkembang selama ini yang menyatakan bahwa isi kurikulum adalah kumpulan bahan ajar adalah perlu disempurnakan karena tidak hanya dituntut bahan ajar saja akan tetapi muatan lain dalam isi kurikulum wajib kita sertakan dalam menyusun kurikulum. Maka metode, strategi, media yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar akan membantu guru untuk mentransmisikan isi kurikulum secara komprehensif pada peserta didiknya.

3. Aktifitas Belajar

Kegiatan utama bahkan jantungnya kurikulum ada pada aktifitas belajar yang direkayasa sedemikian rupa sehingga isi kurikulum yang disusun serta tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Aktifitas belajar sering juga diistilahkan dengan proses belajar mengajar. Maka dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan melibatkan banyak unsur baik siswa, guru, media yang dipergunakan, pilihan metode, strategi, pendekatan, penciptaan lingkungan belajar yang dinamis, pengaturan dan pengelolaan kelas dan lain sebagainya. Zais menyatakan bahwa aktifitas belajar adalah jantungnya kurikulum karena akan berpengaruh terhadap pembentukan pengalaman belajar pada siswa.

4. Evaluasi

Evaluasi adalah tahapan penting sekaligus sebagai unsur utama dalam kurikulum yang akan memberikan informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kurikulum. Untuk mengetahuinya cukup dengan membandingkan antara tujuan dengan hasil, apabila hasil memperlihatkan ketercapaian tujuan maka dapat dikatakan kurikulum yang telah direncanakan dan dilaksanakan berhasil dijalankan.

Evaluasi berisikan informasi yang menggambarkan secara keseluruhan kinerja dalam proses belajar mengajar. Menurut Print (1993:187) "Evaluasi adalah sumber informasi bagi *stakeholders* pendidikan untuk mengetahui pencapaian kinerja dalam proses belajar mengajar sekaligus menentukan kebijakan pendidikan maupun keputusan dalam pengembangan kurikulum pada periode selanjutnya". *Phi Delta Kappa National Study Committee on Evaluation* (Brady, 1992:236) menjelaskan bahwa evaluasi adalah "proses menggambarkan, mendapatkan, dan menyediakan informasi yang berguna untuk pertimbangan pengambilan keputusan", dengan pandangan yang tidak jauh berbeda Brady (1992:235) mengemukakan lima defenisi umum dari evaluasi kurikulum yaitu:

- a. Mengukur derajat tingkat capaian dari siswa yang dinyatakan dalam perilaku dan sasaran hasil
- b. Membandingkan performan peserta didik dengan standar
- c. Mendiskripsikan dan menilai kurikulum
- d. Mengidentifikasi area untuk kurikulum pengambilan keputusan dan pemilihan untuk menganalisa informasi-informasi yang relevan pada area keputusan
- e. Menggunakan pengetahuan yang professional untuk menilai proses secara kontinue pada implemtasi

Tujuan melakukan evaluasi bermacam-macam dan sangat tergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang melakukannya. Secara prinsip Tyler (1949:104) menyatakan bahwa "evaluasi merupakan operasionalisasi yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum yang bertujuan untuk menemukan sejauh mana pengalaman belajar sebagai pengembang dan pengaturan hasil-hasil yang aktual". Selanjutnya Tyler menjelaskan bahwa proses evaluasi adalah proses yang sangat

utama dalam menentukan kekuatan dari tujuan pendidikan yang sebenarnya ingin dicapai sehingga dapat ditentukan tingkat perubahan perilaku yang aktual dari siswa selama proses belajar berlangsung. Secara khusus Tyler menekankan evaluasi pada dua aspek khusus yaitu pengalaman belajar dan perubahan perilaku siswa selama proses belajar mengajar, apabila pengalaman belajar dan perubahan perilaku memperlihatkan sebuah kecenderungan yang positif maka Tyler mengindikasikan adanya sebuah respek kurikulum yang positif. Pendapat Tyler juga di amini oleh Zais (1972:369) yang memandang evaluasi kurikulum sebagai proses menyeluruh (totalitas) dimana prestasi siswa yang menjadi bagian penting serta mendasar untuk menentukan dalam penetapan *grades* dan *marks* sehingga dengan dasar penetapan ini siswa akan terklasifikasi dan terdientifikasi dengan benar, selanjutnya Zais menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum tidak hanya pada evaluasi dokumen tertulis saja akan tetapi yang lebih penting adalah kurikulum yang diimplementasikan sebagai kesatuan fungsional dan termasuk didalamnya interaksi antara siswa, guru, materi dan lingkungan. Hampir sama dengan Zais, Print (1993:215) menerangkan bahwa evaluasi kurikulum dipergunakan untuk kepentingan:

pertama sebagai umpan balik bagi siswa *kedua* mengetahui sejauh mana siswa dapat mencapai tujuan *ketiga* sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan dan peningkatan kurikulum *keempat* membantu siswa dalam mengambil keputusan *kelima* menjelaskan tujuan yang ingin dicapai *keenam* membantu pihak lain dalam mengambil keputusan terkait dengan peserta didik

Selanjutnya Print juga menjelaskan bahwa evaluasi adalah tahap/proses yang terdiri atas pengukuran (*measurement*) yaitu kalimat yang dipakai untuk melihat pencapaian target dengan menggunakan terminologi kuantitatif (angka) dan penilaian (*assessment*) adalah juga termasuk dalam cakupan pengukuran dengan menambahkan interpretasi dan representasi atas data-data yang diperoleh dari pengukuran. Maka untuk membuat putusan akhir dari proses evaluasi harus dengan mengumpulkan data dari interpretasi penilaian dan hasil pengukuran. Murray Print secara sederhana hanya membagi evaluasi pada dua jenis *pertama* evaluasi produk yaitu evaluasi yang

dilakukan terhadap siswa atas pencapaian dalam aktifitas belajar *kedua* evaluasi proses yaitu evaluasi terhadap pengalaman dan aktifitas yang terlibat dalam situasi pembelajaran diperoleh siswa.

Akan tetapi yang paling penting menurut Nasution (1999:88) “setidaknya ada tiga tujuan melakukan evaluasi yaitu *pertama* mengetahui hingga menentukan manakah siswa yang mencapai kemajuan kearah tujuan yang telah ditentukan *kedua* menilai efektifitas kurikulum *ketiga* menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum”.

Ahli-ahli di atas sangat menekankan akan pentingnya evaluasi dilakukan dalam pengembangan kurikulum sebagai proses yang harus dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Evaluasi adalah proses yang tidak sederhana dan tidak sulit sekiranya perangkat-perangkat evaluasi yang dibutuhkan telah dipersiapkan sedini mungkin. Hal yang paling penting dipersiapkan dalam melakukan evaluasi adalah indikator evaluasi yang harus jelas dan kelengkapan data yang akan dipergunakan dalam evaluasi. Sekiranya dua hal ini disediakan dengan baik dan lengkap maka evaluasi akan menjadi proses yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Nasution (1999:89) memberikan arahan agar sekiranya evaluasi dilakukan berdasarkan *pertama* determinan kurikulum yaitu orientasi filosofis, konteks sosial ekonomi, hakekat pelajar, hakekat bahan pengajaran *kedua* harapan-harapan golongan klien dan konsumen *ketiga* bukti mengenai tingkat produktifitas dengan mempertimbangkan hasil belajar, biaya dan waktu.

Dalam pandangan Sukmadinata (2002) komponen kurikulum diidentifikasi kepada empat unsur yaitu tujuan, bahan ajar, srategi, media pengajaran dan evaluasi. sedangkan Hamalik (2006) tidak jauh berbeda dengan Sukmadinata yang menyatakan unsure kurikulum terdiri atas tujuan, materi, metode, organisasi dan evaluasi. Dalam berbagai redaksi dan sudut pandang komponen kurikulum dapat saja diperluas sehingga dapat menjamin keperluan tertentu dalam rangka pengembangan kurikulum dan kebutuhan masing-masing institusi

D. Fungsi dan Peranan Kurikulum

Keberadaan kurikulum dalam pendidikan sudah tidak diragukan lagi yaitu sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan nasional sehingga peranan dan fungsi ini adalah menjadi lebih penting dan upaya untuk mengelola kurikulum secara baik dan professional adalah tugas yang tidak sederhana yang dilakukan oleh pengembang kurikulum. Hamalik (2006;95) mengatakan bahwa setidaknya kurikulum memiliki tiga jenis peranan yang sangat penting yaitu *pertama* peran konservatif dimana tugas dan tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat kepada generasi muda yaitu siswa *kedua* peranan kreatif dimana sekolah memiliki tanggungjawab mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman *ketiga* peran kritis evaluatif yaitu kurikulum berperan menyeleksi dan mempertahankan nilai dan budaya yang harus dipertahankan dan nilai serta budaya baru yang harus dimiliki peserta didik. Jhon McNeil (1990) dalam Sanjaya (2007;25) menyatakan fungsi kurikulum dilihat dari isi cakupannya dapat dikelompokkan pada empat fungsi utama yaitu *pertama* fungsi pendidikan umum (*common and general education*) yaitu fungsi kurikulum mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang baik dan bertanggungjawab *kedua* suplementasi (*supplementation*) yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan memberikan pelayanan kepada setiap siswa yang beragam *ketiga* eksplorasi (*exploration*) yaitu kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa *keempat* keahlian (*specialization*) yaitu kurikulum berfungsi untuk mengembangkan keahlian anak sesuai dengan minat dan bakatnya

E. Model Pengembangan Kurikulum

Untuk melakukan perancangan kurikulum ini akan berpedoman pada model-model pengembangan yang dikembangkan oleh beberapa ahli dan juga model pengembangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti yang dikembangkan oleh Depdiknas dan jajarannya, beberapa model pengembangan kurikulum yang ditawarkan oleh beberapa ahli seperti model objektif/rasional dicetuskan oleh Tyler

dan Taba, model siklikal oleh Wheeler dan Nicholls, model interaksi/dinamik oleh Walker dan Skilbeck. Tiga Model ini adalah hasil pengembangan satu dan yang lainnya, model siklikal adalah hasil pengembangan dari model rasional, model dinamik adalah kelanjutan pengembangan dari model siklikal.

1. Model rational

Model ini menegaskan bahwa tujuan pengajaran (*statement of objectives*) sangatlah penting dan komponen kurikulum bersifat tetap dan mendukung tujuan pengajaran itu. Pelopor model ini adalah Ralph Tyler dan Hilda Taba.

Menurut Ralp Tyler dalam bukunya yang berjudul *Basic Principles of Curriculum and Introducion*, merumuskan empat pertanyaan sentral yang meminta jawaban secara rasional bagi perencanaan kurikulum ialah (1) apa tujuan yang harus dicapai oleh sekolah? (2) apa pengalaman-pengalaman belajar yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut? (3) bagaimana mengorganisasikan pengalaman-pengalaman tersebut? (4) bagaimana kita dapat memutuskan apakah tujuan-tujuan tersebut tercapai?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum dapat menjadi suatu proses yang dikontrol dan logis, dimana langkah pertama adalah yang paling penting Maka Tyler merumuskan model pengembangan kurikulum dalam empat tahap yaitu (1) menetapkan tujuan (2) memilih sejumlah pengalaman belajar (3) mengorganisasikan pengalaman belajar (4) melakukan evaluasi.

Hilda Taba dalam bukunya yang berjudul *Curriculum Development Theory and Practice* menyatakan bahwa langkah awal penyusunan kurikulum dimulai dari perencanaan unit-unit mengajar-belajar yang spesifik oleh guru, bukan diawali dengan desain kerangka (*framework*) yang umum. Unit-unit tersebut diuji / dilaksanakan dalam kelas, yang pada gilirannya digunakan sebagai dasar empirik untuk menentukan desain yang menyeluruh (*overall design*). Maka Taba merumuskan 7 tahap dalam pengembangan kurikulum yaitu (1) diagnosis kebutuhan (2) formulasikan tujuan (3) memilih isi/bahan (4) mengorganisasikan bahan (5)

memilih sejumlah pengalaman belajar (6) mengorganisasikan pengalaman belajar (7) penekanan pada evaluasi yaitu bagaimana melakukan evaluasi.

2. Model siklikal

Merupakan pengembangan dari model rasional yang berpandangan bahwa proses kurikulum merupakan aktifitas yang berkelanjutan dan secara tetap akan diperbaharui. Pelopor model ini adalah D.K Wheeler , Audrey and Nichols.

Menurut D.K Wheller dalam bukunya *Curriculum Process* pengembangan kurikulum seperti lingkaran kerja dimana masing-masing unsurnya saling berhubungan dan saling ketergantungan dengan dalam pola lingkaran yang ada. Maka Wheller memperkenalkan modelnya dalam 5 tahap yang tersusun berbentuk lingkaran: (1) menentukan aims, goals dan objectives (2) menentukan pengalaman belajar (3) memilih isi/bahan (4) mengorganisasikan dan mengintegrasikan pengalaman belajar dan isi bahan ajar (5) melakukan evaluasi.

Audrey dan Howard Nicholls dalam bukunya berjudul *Development Curriculum: a Practice Guide* yang menitik beratkan pada pendekatan logis dimana kebutuhan baru akan muncul dari perubahan situasi dan perubahan itu harus direncanakan, dipekenalkan serta rasional dan sah menurut proses yang logis. Nicholls membuat model pengembangan kurikulumnya pada 5 fase yaitu: (1) melakukan analisis situasi (2) memilih tujuan (3) memilih dan mengorganisasikan tujuan (4) memilih dan mengorganisasikan metode (5) melakukan evaluasi.

3. Model dinamik/interaksi

Juga sebagai keberlanjutan dari model rasional dengan penekanan pada hubungan antara komponen (*element*) kurikulum yang tetap dengan kebutuhan siswa. Pelopor model ini adalah Decker Walker dan Malcom Skilbeck

Menurut Decker Walker pengembangan kurikulum tidak mesti mengikuti urutan yang rasional dari unsur kurikulum ketika kita memikirkan kurikulum. Maka Walker memperkenalkan model pengembangan kurikulumnya yang terdiri pada 3 tahap: (1) menentukan platform (2) membuat berbagai pertimbangan mendalam (3) mendesain kurikulum

Melcolm Skilbeck mengusulkan sebuah pendekatan dalam memikirkan kurikulum pada tingkatan sekolah dimana model ini untuk kepentingan pengembangan sekolah berbasis kurikulum. Model pengembangan yang dikemukakan oleh Skilbeck terdiri atas 5 tahap (1) analisis situasional (2) formulasikan tujuan (3) membangun program (4) interpretasi dan implementasi (5) pengawasan, umpan balik, penilaian dan rekonstruksi

F. Inovasi (Perubahan) Kurikulum

Isitilah perubahan sangat sering kita dengar yang disandingkan dengan isitilah inovasi, dalam ruang lingkup kajian pendidikan, dalam pemerintahan, dan pada beberapa aspek kehidupan. Begitu seringnya dipakai sehingga terdapat beberapa istilah lain yang memiliki kandungan makna yang tidak jauh berbeda yaitu diskoveri (*discovery*) dan invensi (*invention*), ketiga istilah ini di tujukan pada maksud yang sama yaitu perubahan. Namun bila kita tinjau dalam kamus Bahasa Indonesia maka artinya adalah penemuan. Penemuan dan perubahan memiliki kedekatan makna dan merupakan sebuah rantai proses dimana dengan adanya penemuan maka akan terjadi sebuah perubahan dan perubahan yang terjadi akibat adanya sebuah penemuan. Penemuan yang dihasilkan oleh Einstein dengan teori Relativitasnya membawa perubahan yang sangat besar dalam bidang teknologi senjata, akibatnya lahir berbagai persenjataan pemusnah massal dalam bentuk bom atom yang memiliki kemampuan mampu membunuh manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya dalam jarak yang jauh. Penemuan teknologi dalam komunikasi tanpa kabel (*handphone*) membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi dan bisnis hari ini semakin mudahnya urusan bisnis dan transaksi dilakukan dengan hanya menggunakan alat komunikasi HP tanpa tatap muka dan bertemu langsung akan tetapi kesepakatan dan transaksi bisnis dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Berarti setiap penemuan yang dihasilkan pasti akan membawa perubahan dalam kehidupan. Donald P Ely (1982) (Ibrahim,1988:40) memberikan sebuah benang merah antara inovasi, invensi dan diskoveri. Diskoveri adalah suatu penemuan sesuatu yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan yang sudah ada akan tetapi belum diketahui oleh orang lain. Invensi

adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru artinya hasil kreasi manusia benda atau hal lain yang ditemukan benar-benar baru dan sebelumnya belum ada yang kemudian diadakan dengan kreasi manusia. Inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang baik berupa hasil invensi maupun diskoveri yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah.

Skogen menjelaskan lebih lanjut tentang makna perubahan yaitu perubahan dalam inovasi adalah perubahan yang terencana dan bertujuan untuk memperbaiki. Perubahan yang hanya sekedar berubah yang tampil beda sekarang dengan kemaren dalam konsep perubahan inovasi tentunya tidak dapat dijadikan sebagai contoh yang tepat, maka perubahan dalam konsep inovasi memerlukan sejumlah rencana-rencana yang matang sebelumnya baik untuk menentukan apa yang akan dirubah, mengapa dilakukan perubahan dan untuk siapa perubahan serta bagaimana melakukannya. Setelah melakukan perencanaan maka unsur lain yang harus diperhatikan dengan seksama adalah mempraktekkan/mengimplementasikan sebuah konsep menjadi tindakan yang jelas. Skogen menilai bahwa tahap implementasi/praktek adalah adalah tahap yang sangat sulit sebab kalau hanya berbicara ide, konsep dan pikiran adalah hal yang mudah dan bisa dilakukan semua orang namun bagaimana menjadikan ide lebih realistis dari solusi yang terpersepsi menjadi solusi yang diimplementasikan sering kali merupakan bagian yang tersulit.

Banyak ahli dan praktisi memberikan pendapatnya tentang inovasi, Skogen berpendapat Inovasi adalah perubahan yang direncanakan, yang bertujuan untuk memperbaiki praktek-praktek, kata kunci dalam inovasi adalah *perubahan*. Perubahan dapat diimplementasikan dalam kaitannya dengan semua jenjang dan sektor di bidang yang bersangkutan, Thompson dan Eveland (1967) dalam Chaeruman (2007) mendefinisikan inovasi sama dengan teknologi, yaitu suatu desain yang digunakan untuk tindakan instrumental dalam rangka mengurangi ketidak teraturan suatu hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu tujuan tertentu, menurut

Joseph Schumpeter dalam Rogers (1983:134) definisi inovasi dalam ekonomi (1934) adalah mengenalkan barang baru dimana para pelanggan belum mengenalnya atau kualitas baru dari sebuah barang; (1) mengenalkan metoda produksi baru yang dibutuhkan, ditemukan melalui serangkaian uji coba ilmiah (2) membuka pasar baru, dimana perusahaan sejenis tidak memasukinya, baik pasar tersebut ada atau belum ada ketika perusahaan memasukinya (3) menguasai sumber bahan baku baru untuk industri barang (4) menjalankan organisasi baru, seperti menciptakan monopoli, atau membuka monopoli perusahaan lain. Rogers sendiri juga mendefinisikan inovasi yang senada dengan beberapa ahli di atas yaitu suatu gagasan, praktek atau obyek yang dirasakan sebagai suatu hal yang baru bagi individu. Dari sejumlah definisi yang dikemukakan terlihat bahwa inovasi terdiri atas dua kata kunci yang *perubahan* dan *hal yang baru*. Maka inovasi akan selalu terkait dengan dua konsep utama yaitu perubahan dan hal-hal yang baru yang ditujukan untuk keperluan perbaikan dan peningkatan

Perubahan kurikulum menurut Nasution (2006:122) merupakan perubahan sosial *curriculum change is social change* karena perubahan kurikulum menyangkut banyak variabel yang termasuk didalamnya yaitu guru, murid, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat, selanjutnya Nasution memperinci perubahan dapat berupa substitusi, alterasi, variasi, restrukturisasi, dan orientasi baru. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Print (1993:221) perubahan kurikulum merefleksikan perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat secara luas dan pendidikan pada umumnya sehingga perubahan kurikulum juga merefleksikan perubahan sosial. Taba (1962:454) juga menyatakan tentang perubahan kurikulum yang merupakan perubahan institusi yang termasuk didalamnya perubahan tujuan-tujuan dan juga termasuk didalamnya perubahan individu.

Kurikulum ilmu ekonomi khususnya yang diajarkan pada berbagai jenjang dan tingkat pendidikan di Indonesia yang selama ini berkiblat pada teori-teori neoklasik dan klasik sudah saatnya dilakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada perombakan secara totalitas yang termasuk didalamnya tujuan, metode, media,

isi/bahan ajar, evaluasi. Akan tetapi tidak mesti dimaknai dengan melakukan perubahan sosial revolusioner akan tetapi arah perubahan ini adalah tetap menginginkan adanya pengajaran ilmu ekonomi dengan paradigma baru, orientasi baru yang Pancasilais menggantikan liberalis dan kapitalis.

II. Ekonomi Pancasila

A. Pengertian

Istilah ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Pancasila barangkali hanya dikenal di negara kita saja Indonesia dan tidak akan ditemui di negara lain karena Pancasila sebagai dasar negara hanya ada di Indonesia, namun dalam sistem ekonomi yang banyak di anut oleh negara-negara di dunia tidak mengenal istilah Sistem Ekonomi Pancasila sebagai salah satu dari sistem ekonomi yang ada, hanya ada sistem ekonomi liberal, sosialis, islam.

Walupun tidak dalam kelompok sistem ekonomi yang dikenal secara luas, sistem ekonomi Pancasila tetap eksis dan dapat diterima secara luas oleh bangsa Indonesia karena nilai-nilai yang ada dalam system ekonomi Pancasila adalah praktik-praktik perekonomian yang telah dilakukan dan menjadi bahagian penting dari aktifitas ekonomi bangsa Indonesia yang telah berjalan sejak dulu dan diwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Profesor Mubyarto (Raharjo:2004) dari impresi penelitiannya yang amat luas menegaskan bahwa praktek Ekonomi Pancasila (*Pancasila in action*) dengan mudah dapat dijumpai dan dikenal dimana-mana di seluruh Indonesia seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), julo-julo, simpan pinjam, gotong royong, pasar tradisional, bahkan ada diantara aktifitas perekonomian itu yang telah berorientasi ekspor seperti kerajinan tangan dan kulit yang telah merambah pasar luar negeri, oleh karena itu semakin jelas bahwa ekonomi Pancasila adalah jiwa dan karakter bangsa Indonesia yang menjadi kepribadian bangsa Indonesia dengan nilai-nilai luhur sebagai karaktersitiknya. Memahami ekonomi Pancasila tidaklah sulit karena pada hakekatnya dikembalikan pada sila-sila yang lima yang ada dalam Pancasila itu sendiri

Mubyarto (2003) mengeksplanasikan tentang ekonomi pancasila sebagai berikut; *Pertama* Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika Pancasila adalah landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat, *kedua* Intisari Pancasila (Eka Sila) menurut Bung Karno adalah gotongroyong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik *Trisila* yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio-demokrasi, *ketiga* Sistem Ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem *ekonomi kerakyatan* yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya juga dinikmati oleh semua warga masyarakat, *keempat* Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi yang bermoralkan pancasila sebagai ideologi bangsa yang mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) dan mengacu pada setiap silanya, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional, sila ketiga Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi, sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi, sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

B. Tinjauan Ekonomi Pancasila

1. Akademis

Banyak perdebatan dan pertentangan yang terjadi semenjak digulirkannya gagasan ekonomi Pancasila, perdebatan yang terjadi seputar keragu-raguan ekonomi

Pancasila dalam konteks keilmuannya. Pendekatan ekonomi Pancasila sebagai sebuah disiplin ilmu menuntut tiga tahapan pembahasan, *pertama* ontologis yaitu keberadaan dan hakekatnya, *kedua* epistemologis yaitu bagaimana memahami ekonomi Pancasila dan bagaimana cara kerjanya, *ketiga* aksiologis yaitu mempertahankan hasil atau kondisi ideal yang dihasilkan oleh proses pembentukan ekonomi Pancasila (Raharjo, 2004), tiga landasan keilmuan ini kiranya masih menjadi topik hangat dalam berbagai diskusi ilmiah karena ekonomi Pancasila secara keilmuan belum mengukuhkan diri dengan sejumlah persyaratan-persyaratan ideal yang dibutuhkan seperti teori-teori yang mendukungnya, sejarahnya, prakteknya untuk dilaksanakan. Akan tetapi keraguan ini dijawab sendiri oleh Raharjo bahwa gagasan ekonomi Pancasila adalah sesuatu yang sah dan logis karena ekonomi Pancasila merupakan kombinasi *declaration of independence* dan *manifesto komunis* yang pada intinya adalah kombinasi tiga ideologi nasionalisme, sosialisme dan demokrasi. Keraguan terhadap Ekonomi Pancasila sebagai sebuah ilmu telah muncul semenjak digulirkannya gagasan tentang ekonomi Pancasila dalam berbagai diskusi dan seminar yang dikemukakan oleh Mubyarto tahun 1982, banyak ekonom saat itu menilai bahwa yang ada di dunia hanya teori ekonomi kapitalis bahwa sosialis pun dianggap tidak ada dan apalagi ekonomi Pancasila karena sudut pandang mereka saat itu hanya melihat secara kasat mata dan perkembangan teori ekonomi pada saat itu

Apabila perdebatan tentang ekonomi Pancasila sebagai ilmu yang bisa diterima tetap dilanjutkan akan sangat menyita waktu dan energi karena memahami ekonomi Pancasila tidak sesulit kita melahirkan sebuah ilmu, memahami ekonomi Pancasila adalah mengembalikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial yang berketuhanan, beretika, dan bermoral, serta punya ciri lokalitas, maka adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama terutama para ilmuan di negeri ini untuk menggali dan memperkenalkan ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi alternatif dunia di tengah keterpurukan sistem liberalisme kapitalisme, alangkah lebih mulia jika perdebatan kita adalah bagaimana melahirkan ide ini sebagai sebuah pekerjaan besar para ilmuan dari pada hanya mempedebatkan dari sisi lain yang akan semakin

melemahkan semangat, kalau kita telusuri sejarah kelahiran system ekonomi baik liberal maupun sosialis juga tidak terlepas dari perdebatan sengit akan tetapi keinginan untuk menggali dan menghadirkan sebuah solusi melahirkan sebuah kajsian lengkap dan sempurna dari sisi keilmuan tentang sistem liberal dan sosialis yang ada sekarang ini, maka tentunya ekonomi pancasila pun dapat dilakukan hal yang sama sehingga menjadi lebih dapat diterima dengan kajian keilmuan dan penelitian yang mendalam yang dilakukan oleh para ahli di Indonesia

2. Historis

Secara historis ekonomi pancasila sudah menjadi bahagian tersendiri dalam aktifitas perekonomian bangsa Indonesia yang telah turun temurun, praktek-praktek perekonomian rakyat yang berjalan selama ini seperti kerajinan kecil dan rumah tangga, simpan pinjam dan saling tenggang, koperasi, pasar tradisional, dan sejumlah aktifitas perekonomian lainnya yang banyak dijumpai di daerah pedesaan merupakan bukti fisik yang mengindikasikan eksistensi ekonomi kerakyatan. Sehingga istilah ekonomi Pancasila sering disebut juga dengan ekonomi kerakyatan yaitu ekonomi berbasis rakyat dari oleh dan untuk rakyat, Mubyarto (2002) menjelaskan bahwa Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Sebuah analisis menarik yang dikemukakan oleh Boeke tahun 1930 tentang adanya ekonomi *dualistic* yang merupakan disertasi yang dibuatnya pada tahun 1910 yang mencermati keberadaan ekonomi di Indonesia dalam pandangannya Boeke mengatakan bahwa di Indonesia terdapat dua sistem ekonomi yang berjalan secara terpisah, di satu sisi system ekonomi kapitalis berjalan sendiri yang dipraktikkan oleh Belanda sementara disisi lain system ekonomi tradisional juga berjalan sendiri, artinya dalam sebuah negara memungkinkan akan berjalannya dua buah system ekonomi yang dipraktekkan secara berbeda dan sangat berlawanan tadi dan pada akhirnya tetap tidak akan ada penyatuan karena sangat sulit mencari titik temu dan persamaanya seperti sulitnya menyatukan air dan minyak dalam satu bejana yang

akan selalu sia-sia, perjalanan panjang bangsa kita nampaknya sesuai dengan teori *dualistic* yang dikemukakan oleh Boeke tadi dan pada akhirnya ekonomi yang dijalankan secara tradisional oleh rakyat Indonesia tetap menjadi pilihan yang sesuai dengan keinginan dari rakyat secara keseluruhan.

3. Ideologis Politik

Sistem ekonomi Pancasila tidak terlepas dari sisi ideologis dan kebijakan politis negara kita terutama situasi yang berkembang saat itu. Setelah perang dunia kedua usai situasi dunia memasuki babak baru dalam sebuah era kompetisi dan persaingan yang tidak sehat terutama antara dua negara yang mencap dirinya sebagai negara besar dan memiliki pengaruh luas dan besar di dunia, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang menjadi sekutu dalam perang dunia pertama dan kedua terlibat persaingan yang sengit dalam menanamkan pengaruhnya di dunia, sering kali dua negara ini terlibat dalam pertikaian-pertikaian dalam memperebutkan daerah-daerah pengaruhnya, sehingga muncul dalam sebutan blok barat dan blok timur yang berseteru dalam sebuah kancah perang dingin. Indonesia dan beberapa negara lainnya pada saat itu berinisiatif untuk tidak meramaikan persaingan itu dengan mendeklarasikan sebuah gerakan yang anti blok yang dikenal dengan gerakan non blok yang prinsip perjuangannya disamping untuk tidak terlibat dalam perseteruan antara dua blok juga ingin menciptakan sebuah konstelasi politik baru ditengah bipolarisasi kekuatan dunia yang berada dalam kekuatan barat dan timur.

Kiranya secara ideologis ekonomi Pancasila menjadi sebuah posisi dan nilai tawar strategis yang mencerminkan sikap, watak dan karakter bangsa Indonesia, Profesor. Mubyarto(1990;102) menyatakan bahwa ideologis pancasila menginginkan keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan anggota masyarakat serta antara materi dan rohani yang berarti ekonomi Pancasila memandang manusia tidak hanya dilihat dari satu segi saja akan tetapi bulat dan utuh sebagai manusia yang utuh dalam berpikir, bertindak laku dan berbuat yang tidak hanya didasarkan pada rangsangan ekonomi saja akan tetapi juga memperhatikan rangsangan-rangsangan sosial dan moral. Dengan demikian filsafat ekonomi Pancasila sangat bertolak belakang dengan

nilai-nilai yang diusung oleh ekonomi liberal dan terpimpin, ekonomi liberal (*free enterprise system*) sangat mengganggu kebebasan individu dalam berusaha sehingga segala penghalang yang akan menghambat kebebasan individu harus disingkirkan dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bangsa dalam bidang ekonomi pemerintah hanya bertindak sebagai polis saja yang mengawasi jalannya kegiatan dan kehidupan perekonomian dan negara hanya akan turut campur tangan secara insidental bilamana terjadi gangguan pada proses mekanisme harga dalam mewujudkan alokasi optimum sumber-sumber ekonomi, system ekonomi terpimpin yang hanya mengakui peranan negara dalam menentukan aktifitas dan hajat hidup rakyat banyak sehingga peran negara terlihat sangat dominan, diantara dua sistem ini kehadiran ekonomi pancasila yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan, gotong royong, kerjasama yang juga tetap memberikan tempat yang proporsional kepada penguasa mengatur dan melahirkan kebijakan-kebijakan yang juga diperuntukkan untuk kepentingan rakyat sehingga dengan demikian ekonomi pancasila hadir sebagai ekonomi pertengahan atau ekonomi alternatif yang mencoba mengambil sisi-sisi positif dari kedua system yang ada dan meminimalisir segala dampak yang akan berakibat merugikan kepentingan rakyat. Dalam pandangan lain Bung Hatta (Swasono,1988:2) lebih cenderung mengatakan ekonomi Pancasila adalah ekonomi sosialis religius dimana ada tiga alasan kuat Bung Hatta dengan pandangannya ini *pertama* sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama dengan adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup *kedua* sosialisme Indonesia merupakan ekspresi dari jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh pengakuan sangat tidak adil dari penjajah *ketiga* para pemimpin Indonesia yang tidak dapat menerima Marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme dan mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri

Dalam berbagai pandangan yang ada agaknya ekonomi Pancasila memiliki karakter yang kuat ala Indonesia sehingga menjadi bahagian tersendiri dalam perkembangan system ekonomi dan menempatkan diri tidak pendukung salah satu

akan tetapi memiliki karakteristik sendiri dan barangkali memiliki kedekatan yang kuat dengan model ekonomi campuran atau alternatif

C. Karakteristik Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem ekonomi yang lahir di bumi Indonesia sekaligus sebagai karakteristik bangsa Indonesia adalah menjadi ciri dan karakteristik utama dari system ekonomi ini. Aktifitas yang dijalankan oleh masyarakat di Indonesia secara konvensional yang kaya dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan juga menjadi karakteristik lain yang menjadikan sistem ekonomi Pancasila sangat unik dan berbeda dengan sistem liberal dan sosialis. Mubyarto (1990:53) merincikan lima ciri sistem ekonomi Pancasila yaitu *pertama* roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral, *kedua* kehendak kuat dari seluruh masyarakat kearah keadaan pemerataan social (*egalitarianisme*) sesuai asas-asas kemanusiaan *ketiga* prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan kebijakan ekonomi nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi *keempat* koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkrit dari usaha bersama *kelima* adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan ditingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial

Irawan (2008) menyebutkan lima ciri-ciri utama yang merupakan karakteristik yang membedakannya dengan sistem yang lain yaitu *pertama* yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah, contoh hajat hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya, *kedua* peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung, *ketiga* masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan

diawasi oleh anggota masyarakat, *keempat* modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia, *kelima* dalam sistem ekonomi Pancasila perekonomian liberal maupun komando harus dijauhkan karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreatifitas yang potensial. Persaingan usaha pun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan.

D. Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi pancasila secara sederhana disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu “sistem ekonomi campuran”, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem ekonomi jalan ketiga yang mendekati sistem ekonomi Inggris atau Negara-negara Eropa barat yang lazim disebut dengan negara kesejahteraan (*welfare state*). Dalam praktiknya ekonomi Pancasila disebut juga dengan ‘Ekonomi Kerakyatan’ karena kegiatan-kegiatan ekonomi yang banyak dijumpai terutama di daerah-daerah pedesaan seperti industri kecil dan kerajinan rakyat, simpan pinjam tanpa bunga, pasar tradisional. Secara konsepsi ekonomi kerakyatan tidak menebar ancaman kepada pengusaha dan pelaku ekonomi dalam skala besar dan tidak pula mempertentangkan antara kelompok pengusaha dan pekerja atau kaum buruh, atau antara kelompok kaya dengan orang miskin namun ekonomi kerakyatan berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang santun dan berkeadilan dan menjamin distribusi pendapatan secara merata sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat dinikmati semua golongan masyarakat

Secara faktual ekonomi kerakyatan yang terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi krisis seharusnya memberi pelajaran kepada pemerintah dan ekonom-ekonom kita untuk lebih serius lagi menjadikan penguatan peran ekonomi rakyat sebagai agenda besar pembangunan ekonomi bangsa. Ketidakpercayaan terhadap ekonomi rakyat, yang sebenarnya adalah wujud ketidakpercayaan diri (*inferiority complex*), merupakan kendala bangsa kita untuk benar-benar dapat lepas

dari ketergantungan ekonomi terhadap negara/lembaga luar negeri seperti IMF. Hal ini pula yang mendorong lebih dominannya kebijakan yang berorientasi pada merangsang masuknya investasi asing dengan melupakan investasi yang telah dilakukan pelaku ekonomi rakyat dalam skala kecil namun yang nilai totalnya sangat besar, berikut adalah beberapa catatan-catatan penting perjalanan ekonomi rakyat dalam masa krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu:

1. Berdasarkan sebuah survei yang dilakukan pusat penelitian kependudukan UGM dengan RAND *Coorporation Santa Monica* tahun 1998 menyimpulkan bahwa krisis ekonomi tahun 1997 tidak mempengaruhi kehidupan keluarga/perorangan di Indonesia
2. Penelitian lapangan tentang Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) Juli-Desember 2000 pada 13 propinsi dengan 10.400 KK sebagai responden menemukan: *pertama* kesempatan kerja tidak menurun akan tetapi naik 4,2%, *kedua* 75% responden mengatakan tidak ada penurunan kesejahteraan, *ketiga* 70% responden mengatakan hidup memadai.
3. Pertumbuhan ekonomi tahun 1998 adalah -13,7%, pada tahun 1997 adalah 4,9%, pada tahun 2002 naik menjadi 4,8% dengan capital flight 10 Miliar/tahun
4. Pada masa krisis usaha-usaha besar banyak yang berjatuhan dan gulung tikar sementara yang bertahan adalah UKM dengan sumbangan sebesar 4,8%

Fakta-fakta yang diungkapkan di atas merupakan bukti yang menunjukkan pada kita betapa ekonomi kerakyatan mampu bertahan dan eksis ditengah krisis, mereka seolah-olah tidak melihat adanya sebuah krisis besar yang terjadi, walaupun ada usahanya mundur akan tetapi semangat persaudaraan dan kebersamaan mampu menutupi dan menciptakan kondisi yang seimbang dalam masyarakat. Beberapa cara yang dilakukan keluarga di daerah pedesaan sebagai kita menghadapi krisis adalah *pertama* mengatur kembali pengeluaran/belanja rumah tangga, *kedua* menitipkan sebagian anggota keluarga pada keluarga yang mampu, *ketiga* pinjam meminjam tanpa bunga, *keempat* kerja lembur dan dibantu dengan anggota keluarga yang lain,

keempat menyimpan aset dalam bentuk emas dan hewan ternak yang sewaktu-weaktu dapat dijual.

III. Pengembangan Kurikulum Ekonomi Pancasila di Pendidikan Menengah

A. Pengajaran Ekonomi di Indonesia

Pengajaran ilmu ekonomi di Indonesia baik di sekolah menengah terlebih perguruan tinggi sangat didominasi oleh pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik, pun dalam kehidupan yang lebih luas dalam praktek pengaturan perekonomian negara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat kentara dengan nuansa ilmu ekonomi klasik dan neoklasik yang nota bene adalah model ekonomi kapital liberal, lahirnya kebijakan-kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh para ilmuwan dan ahli ekonomi yang menduduki posisi strategis bidang perekonomian yang banyak menamatkan studinya di negara-negara yang melahirkan sistem ini terutama Amerika, menurut Mubyarto pada masa era orde banyak teknokrat-teknokrat dari Universitas Indonesia yang diangkat menjadi menteri terutama pada beberapa pos strategis dibidang perekonomian sehingga melahirkan julukan baru bagi Fakultas Ekonomi UI ini sebagai Fakultas yang mengajarkan paham liberal. Nasution (2008) juga menyatakan bahwa saat ini ilmu ekonomi yang diajarkan di Kampus maupun sekolah merupakan ilmu ekonomi yang dikembangkan dari praktik ekonomi barat, tepatnya ilmu ekonomi neoklasik, baik moneterist maupun keynesian dan pengajaran ekonomi ini menjadi doktrin sehingga dalam praktiknya ekonomi pasar yang dilandasi oleh faham neoklasik menjadi lebih dominan dalam aktifitas ekonomi di Indonesia, baik dalam tataran pelaku usaha, konsumen maupun pengambil kebijakan.

Pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik khususnya di Indonesia tidaklah dapat disalahkan karena disatu sisi sebagai negara berkembang yang ingin melakukan akselerasi dalam pembangunan harus melakukan berbagai terobosan dan mengadopsi berbagai kemajuan dari perkembangan dunia yang ada. Akan tetapi semangat untuk mengikuti kemajuan dan perkembangan dengan mengadospinya secara mentah-mentah tanpa adanya proses seleksi dan kesepkatan secara nasional yang

mempertimbangkan berbagai aspek adalah sesuatu tindakan yang sangat keliru. Sistem ekonomi liberal dan kapitalis yang lahir dan berkembang di negara asalnya merupakan wujud yang sesuai dengan karakteristik bangsa Amerika sekaligus merupakan jelmuan dari negara Amerika yang menganut ideologi liberalisme, kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditempuh Amerika juga merupakan wujud nyata dari ideologi liberalisme yang sangat sesuai dengan bangsa Amerika. Indonesia sebagai negara yang memiliki ideologi Pancasila dengan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan sebuah warisan budaya yang telah dijadikan sebagai jati diri bangsa juga memiliki prinsip-prinsip dasar dan asumsi-asumsi pokok dalam mengatur perekonomian negara. Maka sudah seharusnya Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan tolak ukur kebijakan yang dilahirkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan yang penting adalah menanamkan Pancasila ke dalam lubuk hati setiap rakyat Indonesia.

1. Kritikan pengajaran ekonomi di Perguruan Tinggi

Pengajaran ekonomi yang ada sekarang ternyata sangat menjauh dan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan terjadi pergeseran yang lebih memilih pengajaran ekonomi klasik dan neoklasik sebagai yang utama dalam pengajarannya. Sri Edi Swasono menguraikan delapan kekeliruan pengajaran ekonomi di Indonesia khususnya di perguruan tinggi yaitu

Pertama pengajaran ilmu ekonomi saat ini belum mampu melepaskan diri dari pemikiran neoklasikal, yang tidak saja bertitik-tolak dari paham *self-interest*, yaitu maksimisasi *gain* dan minimisasi *sacrifice* sesuai perilaku *homo economicus*, tetapi juga masih terus-menerus cenderung mengabaikan implikasi asertif mono-utilitas terhadap kenyataan bi-utilitas atau multi-utilitas yang mengandung unsur-unsur moralitas yang lebih kompleks *kedua* pengajaran ilmu ekonomi, sebagai kelanjutan dari pemikiran neoklasikal, menyangkan diri pada paham kompetitivisme dengan kuatnya

Kedua, pengajaran ilmu ekonomi, sebagai kelanjutan dari pemikiran neoklasikal, menyangkan diri pada paham kompetitivisme dengan kuatnya.

Kompetisi-bebas atau persaingan-bebas, tanpa memperhatikan apakah asumsi-asumsi dasar yang menyertainya realistik atau tidak, baik dalam kerangka empirik ataupun moralitas ekonominya, telah membentuk suatu *mindset* atau “budaya ekonomi” berkat dibiarkan berlakunya semacam *self-fulfilling presumption* secara berkepanjangan.

Ketiga pengajaran ekonomi di kampus-kampus sejak semula telah kita awali dengan paham *market fundamentalism*. Pasar adalah mekanisme permintaan dan penawaran yang diasumsikan mampu melakukan *self-regulating* (atau *self-correcting*) melalui *an invisible hand* sebagaimana dianut oleh kaum Smithian. Namun tidak banyak diajarkan mengenai kegagalan-kegagalan pasar (*market-failures*) dalam pengajaran ilmu ekonomi. Pasar dalam kenyataannya tidak cukup mampu melayani kepentingan masyarakat. Pasar mengabdikan kepada yang kaya, tetapi mengabaikan yang miskin, sehingga pada dasarnya pasar telah mengabaikan nilai-nilai moral dan kehidupan ekonomi sebagaimana digambarkan dalam berbagai versi oleh Galbraith, Heilbroner, Thurow, J.W. Smith, Amartya Sen, Stiglitz, Petras & Veltmeyer dan oleh hampir semua tokoh strukturalis, bahkan akhir-akhir ini tak terkecuali oleh Soros dan Krugman

Keempat telah diakui adanya apa yang disebut *micro-macro ills* (atau *micro-macro rifts*) di mana ilmu ekonomi mikro dan makro tidak selalu mudah saling bersambung, akibatnya banyak terjadi ketidakcocokan dalam mentransformasikan kepentingan orang-serorang ke arah kepentingan publik. Kepentingan orang-seorang pada tataran mikro bertumpu pada *self-interest*, yang berkelanjutan dengan *Smithian invisible hand, free market, free competition* pada tataran makronya dipresentasikan tanpa friksi sebagai mekanisme *resource allocation* yang efisien, yang berujung pada kecemerlangan *Pareto efficiency* yang mengagumkan. Namun tidak tampak diajarkan dalam pengajaran ilmu ekonomi apa yang diasumsikan sebagai tanpa friksi oleh kaum neoklasikal itu; demikian pula belum sepenuhnya terjawab bagaimana “*box diagram*” (Bowley/Edgeworth) dapat didinamisasi untuk merestrukturisasi ketimpangan struktural dengan tetap menyandarkan pada mekanisme pasar-bebas.

Kelimat pengajaran ilmu ekonomi kurang memberikan perhatian cukup tentang sistem ekonomi komparatif di luar ortodoksi kapitalisme vs sosialisme. Bahkan sekarang, dengan dipersepsikannya secara populer bahwa sosialisme telah “kalah” dan kapitalisme “telah menang” tanpa suatu pendalaman (*scrutiny*) menurut pendapat saya, sebagaimana saya kemukakan di atas, merupakan kasus Stiglitz vs Petras & Veltmeyer. Dengan demikian ini maka pengajaran ilmu ekonomi makin menjadi sempit dan terkapsul oleh kompetitivisme neoklasikal. Dengan demikian pula sebagai akibatnya faktor-faktor nonekonomi, terutama ideologi nasional, kelembagaan dan lingkungan spesifik, yang sebenarnya merupakan kandungan dasar (*basic contents*) dari setiap sistem ekonomi, hanya diacu sebagai faktor-faktor *ad-hoc*, ibaratnya sebagai pengetahuan umum, yang tidak diperlakukan sebagai bagian integral dari suatu sistem ekonomi yang berlaku. Oleh karena itu pengajaran ilmu ekonomi tetap saja dalam posisi *status-quo* atau berjalan “*as usual*”.

Keenam pengajaran ilmu ekonomi sejak awal telah diberikan kepada mahasiswa tanpa membedakan antara *prinsip-prinsip ekonomi* dan *hukum-hukum ekonomi* (yang lebih bersifat teknis dan bebas-nilai) dengan *pemikiran* dan *paham ekonomi* (yang tidak bebas-nilai). Padahal buku teks ilmu ekonomi yang kita gunakan masih berasal dari Barat, khususnya Amerika Serikat, yang tidak bebas-nilai. Oleh karena itu boleh dibilang bahwa untuk setiap bab atau bahkan paragraf para pengajar harus kreatif dan inovatif, mampu memodifikasi, mengoreksi, mengadaptasi—tidak hanya mengadopsi, substansi buku-buku teks. Sikap kreatif dan inovatif ini diperlukan manakala nilai-nilai ekonomi yang bertumpu pada asas perorangan (*individualism*) bertubrukan dengan yang bertumpu pada asas kekeluargaan/kebersamaan (*mutualism/collectivism*), manakala *private wants* bertentangan dengan *public needs* atau sebaliknya, demikian pula manakala masalah ideologi, kelembagaan, lingkungan spesifik dan semacamnya bervariasi atau bahkan samasekali berbeda dalam konteksnya antara negara satu dengan negara lain, antara negara maju dengan negara berkembang, antara Timur dengan Barat

Ketujuh lebih mencemaskan lagi adalah pelajaran ilmu ekonomi di sekolah-sekolah menengah kita, yang tidak saja sepenuhnya menjiplak kekeliruan yang terjadi di kampus-kampus (mengajarkan neoklasikal dan memperkenalkan akhlak *homo economicus* tanpa memperkenalkan moralitas ekonomi Indonesia), tetapi juga telah mengucilkan ilmu ekonomi yang diajarkan itu dari konteks Indonesia dan kekhususannya, baik konteks ideologi, sosial, kultural, institusional, agama maupun konteks histori dan geografi Indonesia. Dalam pengajaran ilmu ekonomi, kita mengingkari pluralisme Indonesia yang mengundang pendekatan multidimensional. Tuntutan-tuntutan khusus bagi Indonesia sebagai “negara kepulauan” dalam menggalang kesatuan dan konsolidasi ekonomi nasional, keberkahan geografis (baik struktur dan letak) dan kekayaan alam melimpah, yang keseluruhannya sangat berbeda dengan cara pandang ekonomi kontinental, telah begitu saja diabaikan dalam pengajaran ilmu ekonomi. Akibatnya, anak didik akan menjadi anggota masyarakat yang lengah, terkucil dari kenyataan Indonesia, yang akan berakibat kurang dimilikinya kepedulian pada kekuatan ekonomi nasional dan ekonomi rakyat.

Kedelapan sebenarnya sudah lama kita menyadari kelemahan kita dalam pengajaran ilmu ekonomi. Pengajaran ilmu ekonomi banyak mengabaikan metode induktif dan lebih menekankan pada metode deduktif, sehingga anak didik kita banyak kehilangan pemahaman mengenai realita dan kenyataan empirik, akibatnya hanya akan berkemampuan canggung dalam menghasilkan penyelesaian masalah. Keduanya, baik metode pengajaran induktif maupun deduktif, penting bagi keparipurnaan lulusan kita. Lebih parah lagi kasus-kasus empirik yang sangat terbatas dari buku teks banyak berorientasi pada kasus-kasus mancanegara, khususnya Amerika dengan *social* dan *institutional settings* yang samasekali berbeda. Hal ini mengingatkan kepada saya mengenai lelucon intelektual yang terjadi pada tahun 1812 tentang musibah kelaparan di Gujarat. Gubernur Bombay pada waktu itu menolak usulan agar mengirimkan bahan makanan ke daerah yang dilanda kelaparan, agar masalah itu diselesaikan oleh mekanisme pasar sesuai dengan apa yang ia baca di buku Adam Smith, *Wealth of Nations* tentang beroperasinya *the invisible hand*.

Akibatnya ratusan ribu orang meninggal dunia. Ini bukan saja merupakan masalah teori ataupun asumsi di balik teori, tetapi adalah juga keamburadulan antara pola pikir deduktif *vs* induktif dan sekaligus adalah kecanggungan intelektual dalam memperhitungkan *institutional setting* dan tuntutan empirikal. Barangkali hal semacam ini telah pula terjadi di Indonesia.

Kesembilan di ruang-ruang kelas globalisasi ekonomi banyak diungkapkan sebagai suatu cita-cita untuk mencapai efisiensi ekonomi dunia, mengatasi berbagai *barriers* transaksi-transaksi ekonomi dan membuka isolasi atau eksklusivisme kegiatan ekonomi. Internasionalisasi sumber-sumber ekonomi, terutama modal, teknologi, keahlian dan informasi merupakan salah satu wujudnya, membentuk dunia sebagai *a networked-economy*

Kritikan serta kelemahan pengajaran ekonomi di Indonesia juga dikemukakan oleh Mubyarto (2003) yang menyebut dosen-dosen ekonomi di Indonesia harus merasa berdosa karena mengawali menyebarkan ajaran-ajaran yang bersumber pada filsafat moral yang tidak sesuai dengan nilai dan sistem budaya Indonesia yaitu; *pertama* ajaran Adam Smith hanya diambil separo saja yaitu bukunya yang kedua *wealth of nations* (1776) sedangkan bukunya yang pertama tentang moral *the theory of moral sentiments* (1759) sama sekali dilupakan, *kedua* pengajaran ekonomi di Indonesia masih masih bersikukuh mempertahankan bahwa ekonomi positif dan ekonomi normatif tetap terpisah satu dengan yang lain, *ketiga* dosen-dosen ilmu ekonomi di Indonesia harus rajin mengajarkan teori-teori tidak secara deduktif dari buku-buku teks akan tetapi harus secara bersama-sama mengadakan penelitian induktif empirik sekaligus dengan mempelajari secara sungguh-sungguh sejarah (pemikiran) ekonomi Indonesia.

2. Kritik pengajaran ekonomi pada jenjang pendidikan menengah

Pada jenjang pendidikan menengah khususnya di SMA pengajaran ekonomi adalah berpedoman dari apa yang sudah diajarkan dan diterapkan di perguruan tinggi sehingga tidak wajar kesalahan ini dialamatkan kepada guru yang secara khusus mengajarkan mata pelajaran ini karena guru itupun adalah produk perguruan tinggi

yang mendapat asupan ilmu ekonomi dari perguruan tinggi tempat ia menuntut ilmu. Pada beberapa buku pelajaran Ekonomi untuk siswa SMA kelas 1 (Ritonga, dkk, 2003), ditemukan banyak contoh adanya ajaran ilmu (teori) ekonomi yang layak untuk didebat, bukan saja karena 'tidak relevan' melainkan juga karena 'tidak logis' (tidak realistis). Teori itu merupakan pilar dasar ilmu ekonomi dari Barat (Amerika) yang tentu saja mempengaruhi perumusan teori-teori selanjutnya, sehingga pengajaran teori-teori tersebut yang sesuai 'buku teks'-nya justru bertentangan dengan tujuan pendidikan untuk mendekatkan anak didik pada realitas masalah sosial-ekonomi kongkrit di Indonesia.

Kritikan tajam yang dilontarkan oleh Profesor. Mubyarto dan Santoso terkait dengan pengajaran ekonomi khususnya di SMA mengenai 'kebutuhan manusia', dan 'alat pemuas kebutuhan'.

Pertama dalil 'alat pemuas kebutuhan manusia terbatas' sesuai dan sejalan dengan kenyataan dan sistem nilai masyarakat Indonesia? Dalam kehidupan sekarang, apa yang disebut sebagai 'kelangkaan' alat pemuas kebutuhan sulit dipahami murid. Alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa tidak sulit ditemukan jika kita pergi ke toko, supermarket, mall, atau tempat-tempat lainnya. Yang menjadi masalah bukan tidak adanya barang tetapi 'daya beli' masyarakat, sehingga yang benar-benar disebut 'terbatas' adalah 'daya beli' masyarakat bukan "alat" pemenuhan kebutuhan. Itulah yang menjadi pokok perhatian kita, bukannya barang/jasa yang diproduksi dalam jumlah besar, termasuk melalui 'rekayasa kebutuhan' masyarakat. Memang sering muncul berbagai kasus "kelangkaan" di negara kita, misalnya untuk komoditi pupuk dan minyak tanah, namun hal itu bukan semata karena tidak ada 'barangnya', melainkan karena ada praktek penimbunan oleh pedagang yang bertujuan menaikkan harga. Jadi, bukannya dalil itu yang menjadi inti masalah ekonomi, melainkan bagaimana meningkatkan "daya beli" masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya

Kedua tentang dalil yang diajarkan dalam teori ekonomi selalu berbunyi "kebutuhan manusia tidak terbatas", sedangkan "alat pemuas kebutuhan manusia

terbatas”. Dalil itu dikuatkan dengan fakta banyaknya barang dan jasa, yang dianggap sebagai manifestasi banyaknya (tidak terbatasnya) kebutuhan manusia. Juga dinyatakan bahwa kebutuhan manusia selalu meningkat, seiring dengan peningkatan kemakmuran seseorang. Apakah dalil ini relevan atau realistis bagi kita yang menganut ajaran agama dan moral Pancasila? Kebutuhan diartikan sebagai perasaan kurang, yang tentu saja berbeda antarorang atau antargolongan dalam masyarakat. Kita tidak dapat menyamakan kebutuhan antara manajer perusahaan dengan seorang buruh tani di perdesaan. Artinya selalu ada batasan-batasan kebutuhan seseorang, apakah batasan itu berupa standar moral (agama) ataupun kemampuan sosial-ekonomi atau pendapatan seseorang, lagi pula, tidakkah terpikirkan bahwa apa yang dimaksud dengan kebutuhan itu seringkali bukanlah ‘kebutuhan yang sesungguhnya’ (real needs), tetapi sekedar “keinginan” (wants)? Terkait dengan kebutuhan sebagai “perasaan kekurangan”, maka kebutuhan dapat ‘dimanipulasi’ demi kepentingan tertentu, sehingga sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan berubah menjadi ‘kebutuhan’ baginya. Ini terkait dengan ‘rasionalitas kebutuhan’, yang justru dalam bab Konsumsi

Ketiga masalah pokok dalam ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, sehingga bahasan di bab selanjutnya hanya terfokus pada ketiga masalah mikro ini. Faktanya, apakah yang menjadi masalah pokok ekonomi yang riil di negara kita? Bukankah negara kita masih dihadapkan pada masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang serius? Jika siswa diajak untuk mengerti masalah riil ekonomi bangsanya, mengapa masalah kemiskinan atau kekurangan kemakmuran serta ketimpangan distribusi pendapatan tidak dibahas? Mereka perlu dibawa ke arah memiliki sense terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, untuk kemudian diajak mencoba memikirkan pemecahan masalah-masalah riil ini. Masalah-masalah ini dapat diperinci meliputi aspek-aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Ilmu ekonomi harus memiliki visi, yang dikaitkan dengan cita-cita dan pandangan hidup bangsa, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat tentang ajaran prinsip dan motif ekonomi yang tidak bebas nilai masih dalam bahasan tinjauan ilmu ekonomi, diajarkan tentang Prinsip Ekonomi dan Motif Ekonomi yang dijadikan pegangan selama bertahun-tahun karena dinilai relevan dan masuk akal. Dalam ajaran tentang prinsip ekonomi, tindakan manusia yang dinilai sesuai dengan rasionalitas adalah “dengan pengorbanan kecil, seseorang mendapatkan hasil yang besar”. Semuanya diletakkan dalam rangka mengejar kepuasan maksimum bagi individu yang bersangkutan. Mengapa ajaran yang ‘egois’ dan ‘individualistik’ ini ditonjolkan dalam ilmu ekonomi? Bukankah (semua) agama mengajarkan manusia ‘rela berkorban’ demi kepentingan sesama, dan ‘hasilnya’ bisa jadi ia rasakan saat itu (kepuasan batin), atau di kehidupan yang lain (akhirat). Lagi pula, mengapa ajaran rasionalitas sebagai prinsip ekonomi tidak ditekankan pada upaya manusia untuk ‘mengendalikan diri’, dan supaya berpikir rasional dalam menilai kebutuhan hidupnya, tidak perlu dengan mengajarkan keserakahan? Ini menuntut peran hati nurani dalam melakukan tindakan-tindakan ekonomi

Kritikan yang telah dilontarkan oleh dua ahli di atas dapat kita maknai sebagai berikut *pertama* bahwa perguruan tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan yang menghasilkan generasi penerus bangsa ternyata turut andil dalam menciptakan sebuah kondisi yang tidak baik (melemahkan) bangsa dari segi ideologi yang sudah ada, keberpihakan perguruan tinggi khususnya di Fakultas Ekonomi yang lebih banyak menjejali pemikiran-pemikiran liberalisme dan kapitalisme sebagai kurikulum pokok dalam mata kuliah di Fakultas Ekonomi harus dikoreksi secara total. Koreksi ini dimaksud untuk memperbaiki arah dan tujuan umum dalam pengajaran ekonomi sehingga memiliki landasan filosofis yang kuat dan orientasi yang jelas. Mempelajari ilmu ekonomi dalam kerangka ideologis dan orientasi adalah sesuatu yang sangat mutlak diperlukan yang pada akhirnya akan dapat mempertahankan identitas bangsa yang berpancasila di Indonesia, *kedua* bahwa ilmu ekonomi bukanlah ilmu yang permanen dan berlaku tetap melampaui batas waktu dan tempat artinya sangat terbuka kemungkinan dilakukannya perubahan dan penyesuaian pada waktu dan kondisi tertentu sehingga sangat naiflah seseorang berpikir bahwa sebuah

teori dalam ilmu ekonomi akan tetap berlaku sepanjang masa seperti matematika atau ilmu pasti lainnya, sesuai dengan pendapat pakar ekonomi Amerika John S Cams (Rino:2007) pernah mengatakan bahwa ekonomi bukanlah ilmu melainkan sekedar harapan ilmu, berarti ilmu ekonomi dengan sejumlah pemikiran-pemikiran didalamnya akan selalu mengalami perubahan dan tidak akan pernah sampai pada satu titik kematangan untuk menetapkan suatu keputusan yang permanen, *ketiga* ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan tidak boleh tercerabut dari akarnya sebagai ilmu sosial yang berarti pengajaran ilmu ekonomi sangat memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang senantiasa berubah dan tidak ada yang tetap, maka segenap asumsi dalam ilmu ekonomi harus senantiasa memadukan teori yang sudah ada dengan kondisi real masyarakat yang harus memiliki kepetrapaduan dalam keduanya dan hendaknya pengajaran ilmu ekonomi adalah pengajaran yang multidisplin ilmu yang tidak semata-mata mengkaji manusia dari aspek ekonomi saja namun dari sisi sosiologis, antropologis, geografis dan sejarahnya, *keempat* pengajaran ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kerangka ideologis bangsa Indonesia maka Pancasila sebagai ideologi hendaknya menjadi tolak ukur utama sekaligus sebagai patron yang akan menjadi pedoman dalam diri manusia Indonesia, pengajaran ilmu ekonomi adalah pengajaran yang sarat dengan nilai bukan sebaliknya bebas nilai bahkan tidak memiliki nilai sam sekali sehingga pengajaran ekonomi di Indonesia harus diupayakan sejauh mungkin membumikan Pancasila dalam segenap jiwa manusia Indonesia khususnya generasi muda.

B. Pengembangan Kurikulum Ekonomi Pancasila di Pendidikan Menengah (SMA dan MA)

Menyadari akan kelemahan dan berbagai kritikan tajam yang dikemukakan oleh beberapa ekonom yang memiliki kepedulian tinggi terhadap eksistensi ekonomi Pancasila untuk masa depan maka sangat mutlak diperlukan upaya-upaya yang cepat dan tepat dalam untuk mengembangkan ekonomi Pancasila untuk dijadikan sebagai sebuah disiplin ilmu dan ditanamkan melalui pendidikan pada berbagai tingkat, jenis

dan jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pemahaman akan Pancasila yang kita amati selama ini hanya terbatas pada memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara dan dalam tingkatan pengetahuan saja. Sudah saatnya kesalahan ini diperbaiki dengan tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai pengetahuan saja akan tetapi lebih ditingkatkan pada tingkat pemahaman, pengamalan hingga muncul kebanggaan sebagai bangsa yang memiliki pancasila.

Kepentingan negara dalam menyusun sebuah kurikulum pendidikan sangat lah tinggi sehingga tidak bisa diabaikan karena menyangkut masa depan bangsa dan negara ke depan, akan tetapi perlu digarisbawai bahwa kepentingan negara hendaknya tidak dibatasi dan dihalangi oleh hanya ambisi politik dan kepentingan politik sesaat yang sifatnya hanya terbatas pada masa kekuasaan tertentu, maka membicarakan kurikulum ekonomi Pancasila adalah tidak hanya menyangkut kepentingan politik sesaat namun adalah masa depan bangsa Indonesia dan upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kelly (2008:12) yang mengingatkan kita bahwa kepentingan pendidikan dalam pencapaian tujuan-tujuan politis memiliki hubungan yang sangat erat. Namun kepentingan bangsa dan negara tetaplah menjadi prioritas.

Oleh karena itu membicarakan pengembangan kurikulum Ekonomi Pancasila tidak lagi berada dalam wilayah perdebatan politik dan kepentingan sesaat akan tetapi secara luas adalah membicarakan kepentingan nasional sehingga diperlukan langkah-langkah yang jelas serta kerjasama dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat yang ada untuk mewujudkannya baik pemerintah, pakar pendidikan, pengelola pendidikan, siswa, guru, LSM, ekonom, media masa dan lain sebagainya. Semuanya diharapkan secara konstruktif mrnyimngangkan ide, gagasannya untuk melahirkan model pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila.

Ada dua tawaran pokok terkait dengan pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila pada jenjang pendidikan menengah yaitu *pertama* menjadikan sebagai mata pelajaran tersendiri yang dinamakan dengan mata pelajaran ekonomi Pancasila *kedua*

memasukkan muatan ekonomi Pancasila pada kurikulum ekonomi. Agaknya pilihan kedua lebih rasional mengingat struktur mata pelajaran pada jenjang pendidikan menengah telah begitu padat maka muatan ekonomi Pancasila secara konsep hendaknya menjadi pembahasan utama

1. Langkah awal memulai pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila

Pertanyaan yang akan muncul dengan ide kurikulum ekonomi Pancasila ini dari mana kita memulainya?, dan pada jenjang pendidikan apa kurikulum ekonomi Pancasila dapat diajarkan secara menyeluruh?. Untuk memulainya pada tataran praktik dan keseharian pada hakekatnya bukanlah perkara sulit karena sebagaimana yang telah diuraikan ekonomi Pancasila sebagai praktik ekonomi kerakyatan telah menjadi aktifitas dan rutinitas masyarakat Indonesia, maka pengalaman secara kontekstual ini ketika ditransmisikan dalam bentuk kerangka kajian ilmu membutuhkan pemikiran yang matang sehingga dapat dengan mudah mengimplementasikannya. Menurut hemat penulis jenjang pendidikan menengah dipandang sebagai langkah yang tepat untuk memulai pengajaran ekonomi Pancasila dengan beberapa alasan *pertama* jenjang pendidikan menengah adalah jembatan yang akan menghantarkan peserta menuju kehidupan perkuliahan dimana peserta didik sudah mulai dididik dan diarahkan kepada tingkatan berpikir menuju pendewasaan *kedua* secara khusus tawaran pelajaran ekonomi Pancasila dapat dijadikan sebagai mata pelajaran khusus atau bahagian dari kajian ekonomi yang dapat dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk pemahaman ekonomi Pancasila secara hakikinya *ketiga* jenjang pendidikan menengah dicirikan dengan peserta didik yang sudah dapat diajak untuk berpikir dan menanamkan ide dasar untuk pembibitan watak dan perilakunya

Disamping itu hal yang cukup *urgent* juga yang harus dipikirkan oleh guru dan pengembang kurikulum di sekolah khususnya pada jenjang pendidikan menengah adalah mempersiapkan guru/staf pengajar yang berkompeten yang akan mengajar ekonomi Pancasila sehingga ia mampu menggiring pemahaman siswa untuk dapat memahami Ekonomi Pancasila secara benar disamping itu program *refreshing* bagi

guru dan siswa untuk mengupdate informasi tentang materi ekonomi pancasila dapat saja diperkaya dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten baik dari kalangan akademisi maupun dari praktisi atau dapat juga dengan mengikuti serta mengadakan berbagai kegiatan seminar dan lokakarya serta studi observasi keberbagai tempat dan lokasi dimana disana ada berbagai aktifitas ekonomi kerakyatan yang menjadi inti dari ekonomi Pancasila

2. Pengembangan unsur-unsur (komponen) kurikulum ekonomi Pancasila

Komponen kurikulum ekonomi Pancasila mengikuti pendapat dari beberapa ahli kurikulum yang telah diuraikan di atas terdiri atas tujuan, isi, aktifitas dan evaluasi

a. Fungsi

Mengembangkan kemampuan siswa untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep dan teori serta berlatih dalam memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan mata pelajaran ekonomi di Sekolah Mengah Atas dan Madrasah Aliyah adalah:

- 1) Membekali siswa sejumlah konsep ekonomi yang berkembang di dunia sehingga dapat mengetahui dan mengerti peristiwa dan masalah ekonomi yang terjadi
- 2) Membekali siswa dengan sejumlah konsep ekonomi Pancasila serta fenomena-fenomena praktik ekonomi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terutama yang terjadi di lingkungan setingkat individu/rumah tangga, masyarakat dan negara.
- 3) Menumbuhkan jiwa Pancasila dalam diri siswa sehingga mampu berfikir, bersikap dan berperilaku pancasila sebagai identitas dalam melakukan aktifitas ekonomi.
- 4) Menumbuhkan sikap dan watak kemandirian dalam diri siswa sehingga mampu bersaing dalam lingkungan global dengan tetap mempertahankan identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang ber Pancasila

c. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup pelajaran ekonomi di SMA dan MA secara rinci mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Sistem Ekonomi Dunia
- 2) Sejarah Perekonomian Indonesia
- 3) BUMN dan BUMS
- 4) Perkoperasian.
- 5) Kewirausahaan.
- 6) Pengelolaan keuangan perusahaan

d. Standar Kompetensi Lintas Kurikulum

Kompetensi Lintas Kurikulum merupakan kecakapan untuk belajar sepanjang hayat sebagai akumulasi kemampuan setelah seseorang mempelajari berbagai kompetensi dasar yang dirumuskan setiap mata pelajaran.

Kompetensi Lintas Kurikulum tersebut dirumuskan menjadi sembilan kompetensi sehingga siswa mampu:

- 1) Memiliki keyakinan, mempunyai hak, menjalankan kewajiban dan berperilaku sesuai dengan agama yang dianutnya, serta menyadari bahwa setiap orang perlu saling menghargai dan merasa aman.
- 2) Menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan, dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi, serta untuk berinteraksi dengan orang lain.
- 3) Memilih, memadukan, dan menerapkan konsep-konsep dan teknik-teknik numerik dan spasial, serta mampu mencari dan menyusun pola, struktur, dan hubungan.
- 4) Memilih, mencari, dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber serta menilai kebermanfaatannya.
- 5) Memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup, dan teknologi, dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat.

- 6) Memahami konteks budaya, geografi, dan sejarah, serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan, serta berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat dan budaya global.
- 7) Berpartisipasi dalam kegiatan kreatif di lingkungan untuk saling menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab.
- 8) Menunjukkan kemampuan berpikir konsekuen, berpikir lateral, berpikir kritis, memperhitungkan peluang dan potensi, serta siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan.
- 9) Menunjukkan motivasi dan percaya diri dalam belajar, mampu bekerja mandiri, dan mampu bekerja sama dengan orang lain.

e. Standar Kompetensi Bahan Kajian

- 1) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang sistem sosial dan budaya dan menerapkannya untuk:
 - Mengembangkan sikap kritis dalam situasi sosial yang timbul sebagai akibat perbedaan yang ada di masyarakat.
 - Menentukan sikap terhadap proses perkembangan dan perubahan sosial budaya.
 - Menghargai keanekaragaman sosial budaya dalam masyarakat multikultur.
- 2) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang manusia, tempat, dan lingkungan dan menerapkannya untuk:
 - Menganalisis proses kejadian, interaksi dan saling ketergantungan antara gejala alam dan kehidupan di muka bumi dalam dimensi ruang dan waktu.
 - Terampil dalam memperoleh, mengolah, dan menyajikan informasi geografis.
- 3) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan dan menerapkannya untuk:
 - Berperilaku yang rasional dan manusiawi dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi.

- Menumbuhkan jiwa, sikap, dan perilaku kewirausahaan dengan semangat nasionalisme.
 - Menganalisis sistem informasi keuangan lembaga-lembaga ekonomi.
 - Terampil dalam praktik usaha ekonomi sendiri.
- 4) Kemampuan memahami fakta, konsep, dan generalisasi tentang waktu, keberlanjutan dan perubahan dan menerapkannya untuk:
- Menganalisis keterkaitan antara manusia, waktu, tempat, dan kejadian.
 - Merekonstruksi masa lalu, memaknai masa kini, dan memprediksi masa depan.
 - Menghargai berbagai perbedaan serta keragaman sosial, kultural, agama, etnis, dan politik dalam masyarakat dari pengalaman belajar peristiwa sejarah.
- 5) Kemampuan memahami dan menginternalisasi sistem berbangsa dan bernegara dan menerapkannya untuk:
- Mewujudkan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - Membiasakan untuk mematuhi norma, menegakkan hukum, dan menjalankan peraturan.
 - Berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat dan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi, melaksanakan, dan menghargai HAM.

f. Standar Kompetensi Mata Pelajaran

- 1) Kemampuan memahami konsep ekonomi Pancasila serta kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
- 2) Kemampuan memahami realitas ekonomi kerakyatan serta solusi dan kebijakan dalam mengatasinya
- 3) Kemampuan memahami perekonomian internasional, , manajemen, pembangunan ekonomi, tenaga kerja, wirausaha dan model pemecahan masalah ekonomi berdasarkan Pancasila.

g. Kompetensi Dasar, Indikator dan Materi Pokok

Kelas X

Standar Kompetensi

Kemampuan memahami konsep ekonomi Pancasila serta kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

Kompetensi Dasar	Indikator	Cakupan Materi
<p>1. Kemampuan memahami konsep, prinsip, sejarah, praktik ekonomi dunia</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memahami <i>sejarah perekonomian</i> Indonesia dan dunia dari masa ke masa. ▪ Memahami <i>sejarah pemikiran</i> pakar-pakar ekonomi dunia dan pakar-pakar ekonomi Indonesia secara seimbang. ▪ Memahami konsep pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran. ▪ Menganalisis kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi, dan pola hubungan antara pelaku-pelaku ekonomi. ▪ Memahami dan melaksanakan pendekatan deduktif dan induktif dalam proses belajar ekonomi. ▪ Menganalisis peranan pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi yang efisien dan adil. 	<p>Sejarah perekonomian, sejarah pemikiran ekonomi, konsep dasar permintaan dan penawaran, kegiatan ekonomi, pendekatan induktif dan deduktif dalam ekonomi, konsep ekonomi pancasila</p>

Kelas XI**Standar Kompetensi**

Kemampuan memahami realitas ekonomi kerakyatan serta solusi dan kebijakan dalam mengatasinya

Kompetensi Dasar	Indikator	Cakupan Materi
1. Kemampuan memahami konsep, prinsip, sejarah, praktik ekonomi Pancasila 2. Kemampuan memahami pendapatan nasional dan sistem keuangan negara	<ul style="list-style-type: none">▪ Memahami fakta, sumber, dan cara-cara mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran.▪ Menganalisis peran dan kekuatan ekonomi rakyat dan koperasi dalam perekonomian nasional.▪ Memahami peranan modal dalam perekonomian rakyat, peran sistem perbankan dan lembaga keuangan mikro.▪ Memahami metode perhitungan pendapatan nasional.▪ Memahami sistem keuangan negara, perpajakan, dan sistem anggaran (APBN/APBD).	Kemiskinan, pengangguran, UKM dan koperasi, bank dan lembaga keuangan, pendapatan nasional, APBN dan APBD

Kelas XII

Standar Kompetensi

Kemampuan memahami perekonomian internasional, , manajemen, pembangunan ekonomi, tenaga kerja, wirausaha dan model pemecahan masalah ekonomi berdasarkan Pancasila.

Kompetensi Dasar	Indikator	Cakupan Materi
<ol style="list-style-type: none">1. Kemampuan memahami konsep pembangunan dan kerjasama internasional2. Kemampuan memahami konsep wirausaha dan kiat-kiat melakukannya3. kemampuan memahami konsep ekonomi Pancasila diantara sistem ekonomi yang ada	<ul style="list-style-type: none">▪ Memahami pengertian pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi.▪ Menganalisis perdagangan dan kerjasama internasional.▪ Menganalisis konsep, tujuan, manfaat, dan dampak globalisasi terhadap ekonomi Indonesia.▪ Memahami peran dan prinsip-prinsip kewiraswastaan (kewirausahaan) dalam pembangunan ekonomi. deduktif dan induktif dalam proses belajar ekonomi.▪ Memahami konsep sistem Ekonomi Pancasila dan sistem-sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme.▪ Menganalisis peranan pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi yang efisien dan adil.	Pembangunan, kerjasama internasional, globalisasi, wirausaha, ekonomi pancasila

a. Aktifitas

Untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dirumuskan dalam kurikulum ekonomi Pancasila maka aktifitas pembelajaran yang dipakai hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yang empiris artinya dengan mengundang keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat terlibat dalam proses pembelajaran, disamping kegiatan pembelajaran yang bersifat tatap muka, kegiatan

lapangan dalam bentuk studi observasi terutama untuk materi-materi yang sangat aplikatif akan menjadi lebih penting untuk dilakukan sehingga diharapkan siswa tidak hanya paham dari sisi materi secara keseluruhan akan tetapi hendaknya juga terbentuk pola pikir (*mind set*) yang sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu. Disamping itu model pembelajaran lain yang bisa dipergunakan apabila mengikuti pendapat Richard Arends (2008) yaitu *pertama* model pengajaran interaktif yang berpusat pada guru, terdiri atas (1) presentasi dan penjelasan (2) pengajaran langsung (3) pengajaran konsep *kedua* model pengajaran interaktif yang berpusat pada siswa, terdiri atas (1) cooperative learning (2) problem based learning (3) diskusi kelas (4) kombinasi berbagai model dan mendiferensiasikan pengajaran.

Disamping model pembelajaran lainnya juga yang dapat dipakai sesuai dengan pendapat Print (1989) adalah (a) strategi *ekspostori* yaitu sebuah strategi yang memperlihatkan arus informasi berlangsung dari sumber belajar kepada siswa, (b) strategi *interaktif* yaitu strategi yang menghendaki adanya pertukaran antara sumber belajar dengan siswa, (c) strategi *small group teaching* yaitu strategi yang menitikberatkan pada partisipasi kelompok, (d) strategi *inquiry teaching* yaitu strategi yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah, (e) strategi *individualisation* yaitu strategi dengan melihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuannya, (f) strategi *models of reality* yaitu strategi yang menyertakan siswa dalam replikasi pada dunia nyata, (g) Strategi model *Reality* yaitu strategi yang menyertakan siswa, institusi diluar pendidikan dan sejumlah pengalaman belajar

b. Evaluasi

Pendekatan evaluasi hendaknya dengan memadukan antara pendekatan proses dan pendekatan hasil. Dua pendekatan ini sangat direkomendasikan agar dapat diketahui secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pencapaian kompetensi yang telah diraih oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi dengan pendekatan proses berarti melakukan pengamatan secara mendetil untuk mendapatkan informasi yang autentik terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa

dalam memahami konsep ekonomi Pancasila sedangkan evaluasi dengan pendekatan hasil dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai tes baik lisan maupun tertulis yang disesuaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan

BAB III PENUTUP

Kesimpulan

1. Kurikulum Ekonomi Pancasila adalah upaya konkrit yang dilakukan untuk menghadirkan sebuah pemahaman yang kompleks sekaligus untuk membentuk *minset* siswa akan dasar falsafah negara yang dijadikan sebagai sebuah sistem ekonomi alternatif antara dua sistem yang ada saat ini
2. Pentingnya pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila diberikan kepada peserta didik disamping untuk melestarikan warisan budaya dan juga sebagai praktik ekonomi yang berwawasan kerakyatan yang sangat dekat dengan aktifitas perekonomian rakyat sehingga mampu menjembatani antara idealitas teori yang dipelajari dengan realitas yang ada
3. Pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila meliputi tujuan, isi, aktifitas dan evaluasi yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis sehingga dapat memenuhi tuntutan keilmuan secara teoritis dan kebutuhan nasional secara ideologis politis
4. Pengembangan kurikulum ekonomi Pancasila membutuhkan segenap kreatifitas terutama oleh guru sebagai pengembang kurikulum sehingga pendekatan yang dipakai mampu memenuhi aspek kogniti, afektif dan psikomotor peserta didik
5. Pengembangan kurikulum Ekonomi Pancasila dapat dilakukan dengan menciptakan sebuah mata pelajaran baru atau dengan tetap menjadi bahagian dari mata pelajaran ekonomi namun diisi dengan muatan ekonomi Pancasila secara proporsional

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arends, Richard. 2007. *“learning to Teach”*, Avenue of the Americas New York, NY 10020: McGraw-Hill Companies, Inc 1221.
- Brady, Laurie.(1992). Curriculum Development (Thirfd Edition). Australia. Prentice Hall
- Hamalik, Oemar.(1989). Evaluasi Kurikulum. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Hamalik, Oemar. (2006). Manajemen Implementasi Kurikulum: Bagi Pengembang, Pengelola dan Pengawas. Bandung: SPS UPI.
- Ibrahim (1988). *Inovasi Pendidikan*. Depdikbud Dikti P2LPTK.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (1985).Jakarta. Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kelly, A.V (2004). The Curriculum Theory and Practice Fifth Edition.London. Sage Publications
- Madjid, Abdul. Swasno, Sri Edi (Eds) (1988). Wawasan Ekonomi Pancasila.Jakarta. UI Press
- Mubyarto (1987). Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan.Jakarta. LP3ES
- Mulyasa, Enco.(2007). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Nasution,R (1993), Asas-asas Kurikulum, Bandung : Jamars
- . (2003), Kurikulum dan Pengajaran, Jakarta : Bina Aksar
- Print, Murray. (1993). Curriculum Development and Design. Australia. Allen & Unwin
- Rogers, Everett M. (1983). *Diffusion of Innovations*. The Free Press. New York
- Sanjaya,Wina. (2009). “Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran”, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- . (2008). “Kurikulum dan Pembelajaran”, Jakarta. Kencana Prenada Media Grup
- . (2007). Kurikulum dan Pembelajaran. Bandung. Sekolah Pascasarjana UPI
- Siraj, Saedah. (2008). Kurikulum Masa Depan. Kuala Lumpur. Universiti Malaya
- Sukmadinata, Nana Syaodih.(2004). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Tyler, R.W.(1949). Basic Principles of Curriculum and Instructions. Univ. Of Chicago Press.
- Zais, Robert S. (1976).Curriculum Principles and Foundation. London. Harper and Row

Internet

- Chaeruman,Uwes.A.(2008).*Difusi Inovasi Just Theory* [Offline]
<http://www.teknologipendidikan.net/difusi-inovasi-just-theory>. [19 September 2008]
- Hutomo,MardiYatmo.(2008). *Ekonomi Kerakyatan* [Offline] Tersedia:
www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathext=ContentExpress/&view=401/...doc – [23 Oktober 2008]
- Irawan, Doni . (2008). *Pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila di Tengah Praktek Liberalisasi Ekonomi di Indonesia* [Offline] Tersedia:
images.zanikhan.multiply.com/attachment/0/SBdKgoKCtcAAftBbY81/Ekonomi.doc?nmid=94632695 – [23 Oktober 2008]

- Mubyarto.(2002). *Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi* [Offline] Tersedia: <http://www.ekonomirakyat.org/index6.php> [1 september 2008]
- Mubyarto.(2003). *Teori Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Pancasila* [Offline] Tersedia: <http://www.ekonomirakyat.org/index6.php> [1 september 2008]
- Mubyarto.(2002). *Membangkitkan Ekonomi Kerakyatan melalui Gerakan Koperasi: Peran Perguruan Tinggi* [Offline] Tersedia: <http://www.ekonomirakyat.org/index6.php> [1 september 2008]
- Mubyarto.(2003). *Dari Ilmu Berkompetisi ke Ilmu Berkoperasi* [Offline] Tersedia: <http://www.ekonomirakyat.org/index6.php> [1 september 2008]
- Mubyarto.(2007). *Dengan Ekonomi Pancasila Menyiasati Globalisasi* [Offline] Tersedia: <http://persinggahan.wordpress.com/2007/03/20/dengan-ekonomi-pancasila-menyiasati-globalisasi/> [12 september 2008]
- Mubyarto dan Santoso (2007). *Pendidikan Ekonomi Alternatif* [Offline] Tersedia: <http://awansantosa.blogspot.com/2005/05/pendidikan-ekonomi-alternatif.html> [23 Oktober 2008]
- Nugroho.(2008). *Bisakah Ekonomi Pancasila Diwujudkan? (Renungan Mengiringi Kepergian Prof Mubyarto)* [Offline]. Tersedia <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg02346.html> [12 September 2008]
- Raharjo, dawam (2004). *Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu*[Offline] Tersedia <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/msg02346.html> [12 September 2008]
- Santoso, Awan.(2008). *Ekonomi Pancasila Maju Terus* [Offline]. Tersedia <http://awansantosa.blogspot.com/2005/05/ekonomi-pancasila-maju-terus.html> [12 September 2008]
- Santoso,Awan.(2005). *Pendidikan Ekonomi Pancasila Another Economics is Inevitable* [Offline]. Tersedia <http://awansantosa.blogspot.com/2005/05/pendidikan-ekonomi-pancasila-another.html> [3 September 2008]
- Skogen, Kjell. (1994). *Inovasi untuk Inklusi Pengenalan terhadap Proses Perubahan.* Tersedia [Offline] http://www.idp-europe.org/indonesia/buku-inklusi/pdf/17-Inovasi_Inklusi.pdf [30 Agustus 2008]
- Swasono, Sri Edi (2008). *Kemandirian Ekonomi: Menghapus Sistem Ekonomi Subordinasi Membangun Ekonomi Rakyat.* [Offline]. Tersedia www.bappenas.go.id/...&view=409/Sri-Edi%20Swasono.doc [3 September 2008]
- Swasono, Sri Edi (2003). *Kompetensi dan Integrasi Sarjana Ekonomi.* [Offline]. Tersedia <http://www.ekonomirakyat.org/index6.php> [1 September 2008]

